

TESIS
ANALISIS PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROPINSI JAWA TENGAH

disusun oleh :

Deddy Rustiono, SE
C4B004002

telah dipertahankan di Dewan Penguji
pada tanggal 28 Juli 2008
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Dra. Herniwati RH, MS

Drs. Bagio Mudakir, MT

Pembimbing Anggota

Dr. Hadi Sasana, MSi

Telah dinyatakan lulus Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Tanggal Juli 2008
Ketua Program Studi

Drs. Waridin, MS, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2008

Deddy Rustiono

ABSTRACT

This research is intended to analyze the effect of work labour, private investment : PMA realization, PMDN realization and local government expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Central Java Province during the period of 1985-2006.

This study is motivated by the facts that the Central Java Gross Regional Domestic Product has been fluctuated and its value is far from other provinces in Java during the period study. This study makes use of time series data of 1985-2006 and its utilizes regression analysis of “*Ordinary Least Square (OLS)*” and supporting software from SPSS 11.5

The findings of this study suggest that labor forces, private investment (PMA and PMDN) and local government expenditure do give a positive impact on the fluctuation of Central Java GRDP. It is also found that the economic crisis has significant influence on the GRDP negative direction.

It is recommended that to increase GRDP of Central Java Province, a policy is needed to motivate all parties to make investment in this povince. The effort to increase investment should be focused on activities that involve many workers.

Finally the role of regional government trough government expenditure which is able to stimulate the increasing variable of private investment and the opportunity of labour force which is expected to increase the regional economic activities in order to reach the economic growth and people income per kapita.

Key words : economic growth, Central Java, private investment (PMA and PMDN) , work labour, local government expenditure, economic crisis

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja, investasi : realisasi PMA, realisasi PMDN dan belanja pemerintah daerah terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1985-2006.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa PDRB Propinsi Jawa Tengah sangat fluktuatif dan nilainya jauh tertinggal dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau Jawa dalam periode pengamatan yang sama.

Penelitian ini menggunakan data runtut waktu tahun 1985-2006 dan menggunakan analisa regresi "*Ordinary Least Square*" (OLS) dengan bantuan perangkat lunak SPSS 11.5

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis dan memberi arah yang negatif.

Sebagai upaya meningkatkan PDRB Propinsi Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah. Pengembangan usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin.

Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah, investasi swasta : realisasi PMA dan PMDN , angkatan kerja, belanja pemerintah daerah, krisis ekonomi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah” dengan baik.

Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya antara lain : angkatan kerja, investasi dan pengeluaran pemerintah daerah. Sejauh mana pengaruh faktor-faktor tersebut dalam pertumbuhan ekonomi di daerah, dalam hal ini Propinsi Jawa Tengah adalah menarik untuk diamati sebagai bahan kajian.

Temuan dalam tesis ini bukanlah merupakan hal yang baru dalam studi mengenai pertumbuhan ekonomi. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memberi inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian lanjutan. Semoga tulisan ini dapat menambah hasil studi sebelumnya, setidaknya dari dimensi ruang dan waktu.

Penulis juga menyadari bahwa walaupun telah berusaha semaksimal mungkin namun hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karenanya sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam kepada Ibu Dra. Herniwati RH, MS dan Bapak Dr.Hadi Sasana, SE, MSi selaku dosen pembimbing yang telah berkenan dengan kesabaran dan kasih

sayangnya meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, pengarahan petunjuk serta dorongan semangat dalam penulisan tesis hingga selesai.

Rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi UNDIP, Ketua Program, Pengelola dan para Dosen Program Studi MIESP UNDIP Semarang yang telah memberi kesempatan dan dukungan bagi penyelesaian tesis ini;
2. Bapak Dr.Dwisetia Poerwono, MSc, Bapak Prof.Dr. FX.Sugiyanto serta Bapak Drs. Bagio Mudakir, MT yang telah memberikan bimbingan dan arahan;
3. Bapak, Ibu dan adik-adikku yang tak pernah putus memberikan doa dan semangat di tiap langkah;
4. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang , atas dukungan moral dan materiil selama penyelesaian tesis ini;
5. Kepala BPS Propinsi Jawa Tengah beserta staf yang telah membantu penulis dalam pemberian informasi dan data untuk penyusunan penelitian ini;
6. Staff administrasi pada Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pelayanan;

7. Rekan-rekan seperjuangan : Burhanuddin, Siti Khodijah, Moch.Wahyudi,
Moch.Suwarno, Sucipto, Prapdopo, Winarna, Nugraheni, Rastiyono, Mansur :
all of u still in my heart.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga tesis ini
bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Semarang, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	12
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.1 Teori Pertumbuhan Klasik	14
2.1.2 Teori Pertumbuhan Neo Klasik	15
2.1.3 Model Pertumbuhan Agregat	16
2.1.4 Teori Pertumbuhan Baru	18
2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional	19
2.2 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi	22
2.3 Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	22
2.4 Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	29
2.5 Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	34
2.6 Rangkuman Penelitian Terdahulu	38
2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis	41
2.8 Hipotesis	44
III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Definisi Operasional Variabel	44
3.2 Jenis dan Sumber Data	45
3.3 Metode Pengumpulan Data	46
3.4 Teknik Analisis	46
3.4.1 Analisa Kuantitatif	46
3.4.1.1 Model Persamaan	47
3.4.1.1 Pengujian Hasil Persamaan Regresi	49

	Halaman
IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 55
	A. Kondisi Geografis Propinsi Jawa Tengah 55
	B. Kondisi Demografis Propinsi Jawa Tengah 56
	C. Kondisi Perekonomian Propinsi Jawa Tengah 58
	D. Kondisi Ketenagakerjaan di Propinsi Jawa Tengah 61
	E. Kondisi Penanaman Modal di Propinsi Jawa Tengah 63
	F. Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah 68
V	HASIL DAN PEMBAHASAN 72
	5.1 Pengujian Hasil Persamaan Regresi 73
	5.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda 74
	5.1.2 Uji Asumsi Klasik 75
	5.1.3 Uji Chow (<i>Chow-test</i>) 80
	5.1.4 Uji Statistik 81
	5.2 Pembahasan 88
VI	PENUTUP 95
	6.1 Kesimpulan 95
	6.2 Saran 96

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	3
Pertumbuhan Ekonomi Enam Propinsi di Jawa Tahun 2002-2006	
Tabel 1.2	4
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2002-2006	
Tabel 1.3	5
Banyaknya Proyek, Nilai Investasi dan Tenaga Kerja PMDN dan PMA Yang Telah Mendapat Surat Persetujuan Tetap (SPT) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2006	
Tabel 1.4	6
Perkembangan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 2002- 2006	
Tabel 1.5	7
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2002-2006	
Tabel 1.6	8
Perkembangan Realisasi Belanja Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2006	
Tabel 2.6	37
Ringkasan Penelitian Terdahulu	
Tabel 4.1	57
Komposisi Penduduk Prop.Jateng Menurut Usia Produktif Tahun 2002-2006	
Tabel 4.2	58
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2002-2006	
Tabel 4.3	60
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Jawa Tengah Tahun 1985-2006	
Tabel 4.4	62
Perkembangan Penduduk Usia 10 tahun ke atas Menurut Kegiatan Terbanyak di Jawa Tengah Tahun 1985-2006	
Tabel 4.5	64
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN, PMA, Jumlah Proyek & TK yang Terserap di Jawa Tengah Tahun 1985-2006	
Tabel 4.6	65
Rata-Rata Nilai Investasi, Pertumbuhan Investasi, Jumlah Proyek dan Tenaga Kerja yang Terserap di Jawa Tengah Periode Tahun 1985-1996 dan Tahun 1997-2006	
Tabel 4.7	70
Belanja Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Tahun 1985-2006	
Tabel 4.8	71
Proporsi Realisasi Belanja Daerah dan Investasi Swasta Terhadap PDRB di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2006	

	Halaman
Tabel 5.1 Hasil Uji Multikolinearitas	77
Tabel 5.2 Hasil Uji Durbin-Watson	78
Tabel 5.3 Rangkuman Perhitungan Model Regresi Hasil Penelitian	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perubahan Budget Line karena Adanya Pengeluaran Pemerintah	35
Gambar 2.2 Skema Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel-Variabel Yang Mempengaruhinya	41
Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah 1985-2006	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Mentah Tahun 1985-2006	101
Lampiran 2. Data Logaritma PDRB, AK, PMDN, PMA, EXPD 1985-2006	102
Lampiran 3. Hasil Regresi	103
Lampiran 4. Uji Chow	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu ; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994 : 456).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom , Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Propinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan di Propinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat propinsi maupun di kabupaten/kota.

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 , dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2002-2006 Propinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 4,86 %, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata 5,1%). Hingga tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,33%, lebih rendah daripada tahun 2005 yang sebesar 5,35%. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006 ini sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi pada Oktober 2005.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah pada periode studi mengalami fluktuasi dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi

nasional dan Propinsi lain di Jawa merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam, prasarana penunjang relatif sama dibanding propinsi lain, bahkan letak Propinsi Jateng berada di tengah dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Enam Propinsi di Pulau Jawa
Tahun 2002-2006 (dalam persen)

No	Propinsi	2002	2003	2004	2005	2006
1	Jawa Tengah	3,55	4,98	5,13	5,35	5,33
2	DI Yogyakarta	4,50	4,58	5,12	4,73	3,69
3	DKI Jakarta	4,89	5,31	5,65	6,01	5,90
4	Jawa Barat	3,77	4,70	4,78	5,40	5,91
5	Jawa Timur	3,80	4,78	5,83	5,84	5,80
6	Banten	4.11	5,07	5,63	5,88	5,53
7	Nasional	4,50	4,78	5,05	5,68	5,48

Sumber : BPS, PDRB Jawa Tengah berbagai tahun

Dalam kurun lima tahun terakhir, sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang menjadi andalan terbesar di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini ditandai sumbangannya terhadap total PDRB Jawa Tengah berkisar di atas 30% paling tinggi dibanding sektor lain.

Pada tahun 2006 secara sektoral, pertumbuhan di semua sektor cenderung melambat kecuali jasa. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang paling besar (15,41%) diikuti oleh sektor-sektor jasa (7,89%) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (6,63%). Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor dengan pertumbuhan terendah yaitu 3,60%.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Popinsi Jawa Tengah
Tahun 2002-2006 (dalam persen)

No	Sektor	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian,Perkebunan,Peternakan,Kehutanan, dan Perikanan	4.95	-2.05	5.33	4.61	3.60
2	Pertambangan & Penggalian	3.13	5.51	2.73	9.28	15.41
3	Industri Pengolahan	5.46	5.49	6.41	4.80	4.52
4	Listrik,Gas & Air Minum	11.83	0.45	8.65	10.78	6.49
5	Bangunan	10.56	12.92	7.84	6.88	6.10
6	Perdagangan,Hotel dan Restoran	1.85	5.24	2.45	6.05	5.85
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.30	5.91	4.67	7.34	6.63
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.35	2.8	3.78	5.00	6.55
9	Jasa-jasa	-6.05	16.46	5.58	4.75	7.89
PDRB Total		3.55	4.98	513	5.35	5.33

Sumber : BPS, PDRB Jawa Tengah berbagai tahun

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2002-2006

Th	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Realisasi (Juta Rp)	Jml Proyek	Realisasi (Ribuan US\$)
2002	14	777,117.00	44	707,361.83
2003	21	1,062,158.55	57	533,775.89
2004	17	1,900,000.00	46	504,630.00
2005	20	2,032,425.44	47	545,245.98
2006	15	3,125,340.65	51	621,557.00
Total	87	8,897,041.64	245	2,912,570.70 *

Sumber : Badan Penanaman Modal (BPM) Prop.Jateng, diolah

*) Ket jika disesuaikan dengan Rupiah = Rp 26.496.452 juta

Selama tahun 2002-2006 di Propinsi Jawa Tengah telah terealisasi sebanyak 87 proyek dengan nilai sebesar Rp 8.897.041,64. Sedangkan PMA terealisasi sebesar Rp 2.912.570,70 dengan jumlah proyek 245.

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi PMDN selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 44.08% dengan jumlah proyek sebanyak 87, sedangkan jumlah proyek PMA dari tahun ke tahun meningkat tetapi pertumbuhannya rata-rata turun (1.99 %). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah belum optimal dalam usaha menarik investor yang dapat memberdayakan potensi ekonomi di wilayahnya.

Selain investasi, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat

prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah

Untuk mengetahui perkembangan penduduk usia kerja di Jawa Tengah periode tahun 2002-2006 disajikan dalam Tabel 1.4 dan 1.5

Tabel 1.4
Perkembangan Angkatan Kerja di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2002-2006

Tahun	Angkatan Kerja				Sub Jumlah
	Bekerja	%	Mencari Kerja	%	
2002	14,751,088	-	984,234	-	15,735,322
2003	15,196,265	3.02	912,513	(7.29)	16,108,778
2004	14,930,097	(1.75)	1,044,573	14.47	15,974,670
2005	15,655,303	4.86	978,952	(6.28)	16,634,255
2006	15,210,931	(2.84)	1,197,244	22.30	16,408,175
	75,743,684		5,117,516		80,861,200

Sumber : Survei Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, berbagai tahun penerbitan

Tabel 1.5
Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2006

No	Lapangan Usaha	Tahun					Total
		2002	2003	2004	2005	2006	
1	Pertanian	6,180,379	6,776,309	6,242,391	5,875,292	5,562,775	30,637,146
2	Pertambangan & Galian	77,161	88,416	83,935	92,258	120,532	462,302
3	Industri	2,561,101	2,378,941	2,393,068	2,596,815	2,725,533	12,655,458
4	Listrik, Gas, Air Bersih	17,955	25,759	27,737	21,458	28,443	121,352
5	Konstruksi	716,385	722,077	823,010	1,019,306	1,071,087	4,351,865
6	Perdagangan	2,854,665	2,810,709	3,005,440	3,429,845	3,124,282	15,224,941
7	Komunikasi	625,411	706,304	668,811	713,670	645,886	3,360,082
8	Keuangan	128,923	119,750	127,885	140,383	157,543	674,484
9	Jasa	1,589,108	1,551,870	1,540,934	1,748,173	1,763,207	8,193,292
10	Lainnya	-	16,130	16,886	18,103	11,643	62,762
	Total	14,751,088	15,196,265	14,930,097	15,655,303	15,210,931	75,743,684

Sumber : Survei Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, berbagai tahun penerbitan

Dari Tabel 1.4 dan 1.5 di atas terlihat bahwa sebagian besar angkatan kerja di Propinsi Jawa Tengah bekerja pada lapangan usaha pertanian (40,4%), disusul pada sektor perdagangan (20,1%) dan sektor industri (16,7%). Jumlah orang bekerja di Propinsi Jawa Tengah hingga tahun 2006 hanya sebesar 15.210.931 (56,3%) dari total penduduk Propinsi Jawa Tengah sebesar 27.041.083 orang. Jumlah penduduk bekerja terus menerus turun dalam lima tahun terakhir, sementara jumlah pencari kerja terus meningkat rata-rata 5,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan manusia di Propinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan percepatan ekonomi lokal.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

Anaman (2004) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.6
Proporsi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik terhadap
Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2006 (dalam jutaan Rp)

Tahun	Belanja		Belanja		Total
	Aparatur Daerah	%	Pelayanan Publik	%	Belanja Daerah
2002	1,263,237,000	0.59	869,916,000	0.41	2,146,833,408
2003	1,708,415,887	0.70	845,967,760	0.35	2,433,606,983
2004	1,796,201,326	0.70	776,353,033	0.30	2,572,554,359
2005	2,137,094,957	0.73	799,215,779	0.27	2,936,310,815
2006	3,023,900,000	0.76	1,337,920,000	0.33	4,001,820,000
Rerata	1,985,769,834	0.70	925,874,514	0.33	2,818,225,113

Selama tahun 2002-2006 Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah telah meningkatkan belanja daerahnya rata-rata sebesar 17,37 % tiap tahunnya. Belanja Daerah tersebut terdiri dari belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dari Tabel 1.6 terlihat bahwa proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja daerah sebesar 0.70%, lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja pelayanan publik yang hanya sebesar 0.33%. Pertumbuhan realisasi belanja aparatur daerah selama tahun 2002-2006 rata-rata sebesar 25%. Sedangkan belanja pelayanan publik relatif lebih kecil, yaitu rata tumbuh 14,8%. Proporsi maupun perkembangan realisasi belanja publik yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja aparatur daerah menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk kepentingan konsumtif. Keadaan ini menyebabkan realisasi belanja daerah yang besar

belum mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah secara signifikan.

Dari paparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1985-2006.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus pembangunan lebih diletakkan pada daerah Kabupaten/Kota maka sangat menarik untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB. Oleh karena itu untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat diamati dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah relatif tumbuh di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional dan relatif lambat dibanding dengan propinsi-propinsi lain di Jawa. Beberapa faktor yang nampaknya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah adalah faktor realisasi nilai penanaman modal asing (PMA), realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
2. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. "pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*)
Pertumbuhan ekonomi adalah ¹² satu syarat dari banyak syarat yang

diperlukan dalam proses pembangunan (Meier,1989). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (lihat Arsyad,1999). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya

alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.

2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 1994).

Persamaannya adalah :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat penambahan barang modal

ΔL = tingkat penambahan tenaga kerja

ΔT = tingkat penambahan teknologi

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis yakni:

$$Y = Ae^{\mu t} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(1)$$

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

$e^{\mu t}$ = melambangkan tingkat kemajuan teknologi

α = melambangkan elastisitas output terhadap modal, yakni persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal manusia.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).

2.1.3. Model Pertumbuhan Agregat

Glasson (1997) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek diasumsikan konstan, yakni seperti penduduk, upah, harga, teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor penentu penting penting dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor seperti tanah, tenaga kerja dan modal, sedangkan salah satu faktor penentu dari luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditas yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari pertumbuhan ekonomi regional adalah melalui penggunaan model ekonomi makro.

Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri (Glasson,1977) dan dapat ditulis sebagai berikut :

$$O_n = f_n(K, L, Q, Tr, T, So).....(2)$$

Keterangan:

O_n = Output potensial dari daerah n

- K = Modal (Capital)
- L = Tenaga Kerja (Labor)
- Q = Tanah (SDA)
- Tr = Sumberdaya pengangkutan
- T = Teknologi
- So = Sistem Sosial Politik

Apabila dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitatifkan, maka rumus persamaan mengenai pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai contoh:

$$O_n = a_n k_n + (1 - a_n) l_n + t_n \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

- O, k, l, t = tingkat pertumbuhan output, modal, tenaga kerja dan teknologi
- a = bagian pendapatan yang diperoleh modal (yakni produk marginal dari modal)

2.1.4. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994)

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan model ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000).

2.1.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad,1999). Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun beberapa teori secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2. Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja

tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Nicholson W. (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana k merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (Marginal Physical Product). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan

produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Budi Santosa, 2001)

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

2.3. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan

pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan. Disamping itu kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2002).

Menurut Mill pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Menurut Mill, faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi yaitu: mempertinggi pengetahuan teknik masyarakat dan mempertinggi ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan modern dan besar perannya untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat.

Menurut Mankiw (2003) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk

meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

Sementara itu untuk menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, negara-negara berkembang harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, dengan mewujudkan program-program spesifik yakni (Samuelson dan Nordhaus, 2001) :

1. Mengendalikan penyakit serta meningkatkan kesehatan dan nutrisi.

Meningkatkan standar kesehatan penduduk menyebabkan peningkatan produktivitas mereka sebagai tenaga kerja. Pusat kesehatan masyarakat dan penyediaan air bersih merupakan modal sosial yang bermanfaat.

2. Meningkatkan pendidikan, menurunkan angka buta huruf dan melatih tenaga kerja.

Manusia terdidik merupakan tenaga kerja yang lebih produktif karena mampu menggunakan modal secara lebih efektif, mampu mengadopsi teknologi dan mampu belajar dari kesalahan.

3. Di atas semua itu, tidak boleh mengestimasi secara lebih rendah (*under estimate*) terhadap pentingnya sumberdaya manusia.

Becker (1993) mengemukakan bahwa teori modal manusia telah menjadi pemikiran banyak pihak sejalan dengan berhasilnya umat manusia mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk, menanggapi kekhawatiran Malthus akan adanya bencana bagi umat manusia bila penduduk terus bertambah. Teori modal manusia pada dasarnya membahas proses merumuskan bentuk-bentuk investasi yang bisa ditanamkan kepada manusia, sebab manusia diakui

sebagai salah satu sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Samuelson dan Nordhaus (2001) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Kubo dan Kim (1996) mengemukakan bahwa elemen pokok dari teori pertumbuhan Neo Klasik dapat diringkas sebagai berikut :

1. Bahwa pendapatan perkapita suatu negara tumbuh pada tingkat perkembangan teknologi yang *given* dari luar (eksogen)
2. Bahwa pendapatan perkapita negara-negara miskin cenderung tumbuh pada tingkat yang tinggi jika hal-hal lain tetap (konvergen).

Dalam perkembangannya model Neo Klasik dikritik oleh Model Pertumbuhan Endogen, yang diawali oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) yang mengasumsikan tingkat pengembalian yang konstan atau meningkat terhadap modal. Teori Pertumbuhan Endogen membangun komponen endogen perkembangan teknologi sebagai bagian integral dari teori pertumbuhan. Teori ini juga berusaha menjelaskan observasi yang berbeda terhadap pendapatan per

kapita berbagai negara dimana model Neo Klasik gagal ditetapkan. Faktor-faktor seperti modal manusia dan pengeluaran riset dan pengembangan digabungkan sebagai komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam model itu .

Lucas (1988) berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misal meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasinya menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia. Romer (1990) menyebutkan bahwa modal manusia merupakan input kunci pokok untuk sektor riset karena menyebabkan ditemukannya produk baru/ ide yang disadari sebagai pendorong perkembangan teknologi. Dengan demikian, negara-negara dengan stok awal modal manusia yang lebih tinggi, ekonominya tumbuh lebih cepat. Dengan demikian modal manusia disadari merupakan sumber pertumbuhan yang penting dalam teori pertumbuhan endogen (Kubo dan Kim, 1996).

Bank Dunia (1991) mengemukakan bahwa terdapat tiga alternatif pola pertumbuhan :

1. Pola I, Pertumbuhan yang Tidak Berkesinambungan : pada pola ini ekonomi tumbuh pada beberapa fase pertumbuhan yang pesat, namun tingkat pertumbuhannya menurun, stagnan atau hampir stagnan.
2. Pola II, Pertumbuhan yang Terdistorsi yang ditandai dengan resiko kerusakan sumberdaya alam, kurangnya investasi dalam modal manusia dan subsidi untuk modal fisik.

3. Pola III, pertumbuhan yang berkesinambungan melalui akumulasi aset yang tidak terdistorsi atau seimbang, dengan dukungan publik terhadap pengembangan pendidikan primer dan sekunder, perbaikan kesehatan publik dan perlindungan alam.

Pertumbuhan dalam modal fisik bisa saja melimpah ke modal manusia melalui investasi swasta dalam riset dan pengembangan serta pelatihan dalam teknologi yang lebih tinggi yakni dalam pertumbuhan yang didorong oleh teknologi. Untuk dapat melestarikan pertumbuhan angkatan kerja sebagian besar (dan semakin meningkat besarnya) harus memiliki latar belakang sekolah umum yang cukup supaya dapat menguasai keterampilan teknologi serta berpartisipasi dalam perluasan aktivitas riset dan pengembangan. Oleh karena itu sekolah umum yang disediakan secara publik dan pengetahuan yang dihasilkan secara privat bersifat komplementer.

Ranis dan Stewart (2001) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit, pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain

pengembangan secara berkelanjutan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara keduanya (UNDP,1996)

Hubungan atas-bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa melalui upaya pembangunan manusia berkemampuan dasar dan berketerampilan. Tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manajer akan meningkat. Selain itu pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia akan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, lembaga swadaya masyarakat dan ormas. Faktor-faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaanya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misal dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.

2.4. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai ”pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan” .

Menurut Boediono (1992) investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik.

Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang

Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro (1981) adalah:

- (1) Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
- (2) Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
- (3) Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya

mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut:

- (1) Kecilnya jumlah mutlak kapita material;
- (2) Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
- (3) Rendahnya investasi netto.

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu

mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, (3) taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

- (1) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
- (2) Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada
- (3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol)
- (4) Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save =MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (*Capital Output Ratio= COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*)

Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan ratio pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulasi. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan

pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing.

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

2.5. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah).

Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir – proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih

tinggi (Lee Robert, Jr and Ronald W. Johnson, 1998). Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi tersebut adalah :

- (1) Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan;
- (2) Fungsi pengaturan, yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan;
- (3) Fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana;
- (4) Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggungjawab eksekutif;
- (5) Fungsi koordinasi, yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (daerah).

Menurut Arndt (1998) argumentasi mengenai kebijakan publik dalam kaitan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar tidak bisa berperan sendiri mengaktifkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama untuk mencapai efisiensi .

Adanya pengeluaran publik disebabkan adanya kegagalan pasar. adapun menurut Rao (1998) kegagalan pasar tersebut disebabkan karena : (1) Tidak semua barang dan jasa diperdagangkan, (2) Barang-barang yang menyebabkan eksternalitas dalam produksi maupun konsumsi memaksa suatu pertentangan antara harga pasar dengan penilaian sosial dan pasar, dan pasar tidak bisa

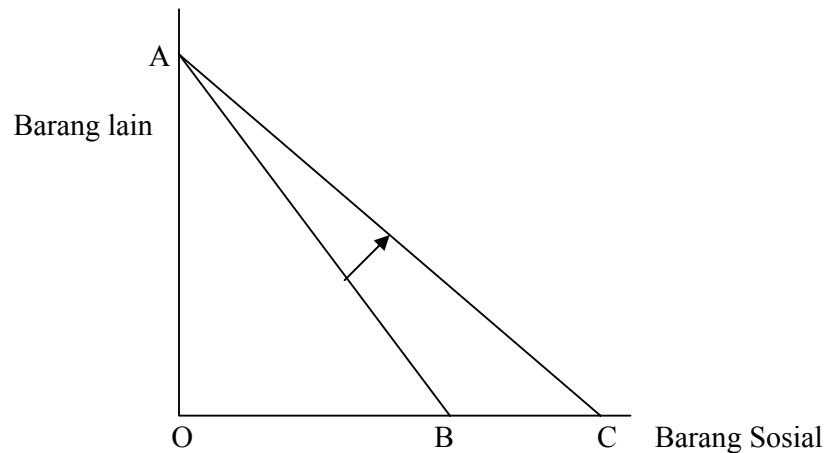
memastikan untuk memenuhi kondisi yang diinginkan. (3) Beberapa barang mempunyai karakteristik *increasing returns to scale*. Dalam kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat memperoleh harga lebih rendah dan output lebih tinggi apabila pemerintah berperan sebagai produsen atau ada subsidi pada sektor swasta untuk menutup biaya karena berproduksi secara optimal. (4) Informasi asimetri antara produsen dan konsumen di bidang jasa seperti asuransi sosial dapat memberi peningkatan moral *hazard* dan pemilihan kurang baik Oleh karena itu intervensi negara diperlukan agar menjamin pendistribusian kembali pendapatan.

Mundle (1998) berpendapat bahwa kemajuan teori dan studi empiris mengenai intervensi kebijakan publik dalam pengembangan manusia mencerminkan tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan sosial.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis efek pengeluaran pemerintah jika dihubungkan dengan konsep budget line dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Perubahan Budget Line karena Adanya
Pengeluaran Pemerintah



Sumber : Sadono Sukirno

Semula dengan anggaran tertentu area konsumsi berada pada pilihan yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya pengeluaran pemerintah untuk barang sosial, misalnya : subsidi untuk meringankan sekolah membuat garis anggaran bergeser ke kanan yakni garis AC . Sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperluas pilihan manusia.

Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan agregat demand akan mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti.

Pada awal pembangunan ekonomi suatu negara umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan (*growth*). Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan negara sedang berkembang adalah terjadinya kekurangan modal

Dengan menggunakan angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai bahan penelitian, analisis pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan.

Secara ringkas dalam Tabel 2.1 disajikan ringkasan penelitian - penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel		Alat Analisis	Hasil Penelitian
			Terikat	Bebas		
1.	Ranis & Stewart (2001)	" <i>Economic Growth and Human Development</i> "	Pertumbuhan ekonomi (GDP perkapita) pada 76 negara berkembang Amerika Latin tahun periode tahun 1960-1992	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usia harapan hidup (<i>long life expectancy</i>) ▪ tingkat kemampuan membaca penduduk dewasa (<i>adult literacy</i>). ▪ Tingkat pendidikan perempuan ▪ Pengeluaran publik untuk sektor sosial ▪ tingkat.investasi domestik ▪ distribusi pendapatan 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat awal pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan. - Adult literacy dan angka harapan hidup berpengaruh positif signifikan - Investasi berpengaruh positif signifikan. - Distribusi pendapatan yang lebih baik berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. - Tingkat awal GDP perkapita berpengaruh negatif signifikan <p>Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar pembangunan manusia harus mendahului atau menyertai pertumbuhan ekonomi agar menghasilkan pola/siklus pembangunan yang <i>virtuous</i>.</p>
2.	Barro (2001)	" <i>Economic Growth in a cross section of Country</i> "	Pertumbuhan ekonomi (GDP) di berbagai negara dengan berbagai tingkat ekonomi tahun 1965-1995	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rasio belanja konsumsi pemerintah-GDP ▪ <i>school attainment</i> ▪ <i>life expetancy</i> ▪ tingkat inflasi ▪ rasio investasi – hubungan perdagangan <p>(indikator modal manusia : <i>school attainment & life expetancy</i>)</p>	OLS	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk laki-laki berpendidikan menengah dan tinggi memberi pengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan GDP perkapita riil. karena pekerja dengan latar belakang pendidikan dilengkapi dengan teknologi yang baru memiliki peran penting dalam penyebaran teknologi. - Penduduk perempuan berpendidikan dasar, menengah, tinggi dan penduduk laki-laki berpendidikan dasar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan GDP perkapita ril. - Pertumbuhan GDP tidak berkaitan secara signifikan dengan lama sekolah perempuan pada tngkat pendidikan dasar merupakan prasyarat bagi tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel		Alat Analisis	Hasil Penelitian
			Terikat	Bebas		
3.	Diah Prasasti (2006)	"Perkembangan PDRB per kapita 30 Provinsi di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas regional & Konvergensi"	PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penduduk berumur 10 th ke atas yang berhasil menamatkan jenjang SMU ▪ Angkatan kerja ▪ <i>Dummy</i> sumberdaya alam ▪ <i>Dummy</i> krisis (mulai th 1997=1) 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel penduduk yang tamat SMU bernilai positif dan signifikan. - Angkatan kerja tidak signifikan - <i>Dummy</i> SDA menunjukkan hubungan positif dan signifikan - <i>Dummy</i> krisis menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan di semua model.
4.	Neni Pancawati (2000)	"Pengaruh Rasio kapital-tenaga kerja, tingkat pendidikan, stok kapital & pertumbuhan penduduk thd GDP Indonesia"	Pertumbuhan output (Y)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio kapital-TK ▪ Tingkat Pendidikan ▪ Perubahan stok kapital ▪ Pertumbuhan penduduk 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio tenaga kerja-kapital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output - Tk. Pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output - Perubahan stok kapital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output - Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan output
5.	Wibisono (2001)	"Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia"	Pertumbuhan ekonomi regional pada 26 Propinsi di Indonesia (tidak termasuk Timtim) tahun 1975-1995	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>educational attainment</i> ▪ <i>life expetancy</i> ▪ tingkat inflasi ▪ tingkat fertilitas ▪ tingkat kematian bayi ▪ dummy regional (indikator modal manusia : <i>educational attainment</i> & <i>life expetancy</i>) 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan, angka harapan hidup, dan tingkat kematian bayi. - Sedangkan tingkat fertilitas dan laju inflasi memberikan efek negatif negatif pada pertumbuhan ekonomi - Propinsi-propinsi yang memiliki modal manusia yang tinggi akan tumbuh lebih cepat terhadap posisi <i>steady state</i>-nya masing-masing. - Peningkatan <i>educational attainment</i> sebesar satu satuan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB sebesar 1,5% s/d 2,6%.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel		Alat Analisis	Hasil Penelitian
			Terikat	Bebas		
6.	Basuki (1997)	"Kajian Mengenai Pengaruh Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi & Tabungan Domestik Indonesia Th 1969-1994"	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan luar negeri ▪ PMA ▪ Bantuan Luar Negeri ▪ Tabungan Dalam Negeri ▪ Kinerja ekspor ▪ Pertumbuhan Angkatan Kerja 	OLS, TSLs	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi : bantuan luar negeri, PMA dan pertumbuhan angkatan kerja - Sedangkan tabungan dalam negeri dan ekspor berpengaruh lemah pada pertumbuhan ekonomi
7.	Alkadri (1999)	"Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia"	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aliran <i>netto</i> hutang LN Pem ▪ Aliran <i>netto</i> hutang LN Swasta ▪ Realisasi PMA ▪ Realisasi PMDN ▪ Ekspor barang ▪ Impor barang ▪ Tabungan pem ▪ Penerimaan pajak ▪ Pengeluaran pem ▪ Pertumbuhan Angkatan Kerja 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi : bantuan luar negeri, PMA, PMDN, pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan angkatan kerja - Sedangkan tabungan dalam negeri, impor, ekspor berpengaruh lemah pada pertumbuhan ekonomi
8.	Yuliarmi (2008)	"Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali"	Pertumbuhan ekonomi Propinsi Bali (1994-2005)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsumsi rumah tangga ▪ Investasi ▪ Pengeluaran pemerintah daerah 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi : konsumsi RT, investasi dan pengeluaran pemerintah

Sumber : berbagai tulisan, diolah

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini mendasarkan pada model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik (*Solow Neo Classical Growth*), maka fungsi produksi agregat standar yang dipakai :

$$Y = Ae^{\mu t} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(4)$$

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

Dalam penelitian ini Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah sebagai (Y); pertumbuhan stok modal dilihat melalui : (1) realisasi nilai penanaman modal asing (PMA), (2) realisasi nilai penanaman modal (PMDN) dan (3) pengeluaran pemerintah daerah (EXPD); Tenaga kerja dilihat dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sehingga diperoleh persamaan :

$$Y = f (PMA, PMDN, AK, EXPD) \dots\dots\dots(5)$$

Dari persamaan (4) dan (5) diperoleh :

$$Y = A PMA^{\beta_1} PMDN^{\beta_2} AK^{\beta_3} EXPD^{\beta_4} \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan :

PMA = Realisasi Penanaman Modal Asing

PMDN = Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

AK = Angkatan Kerja

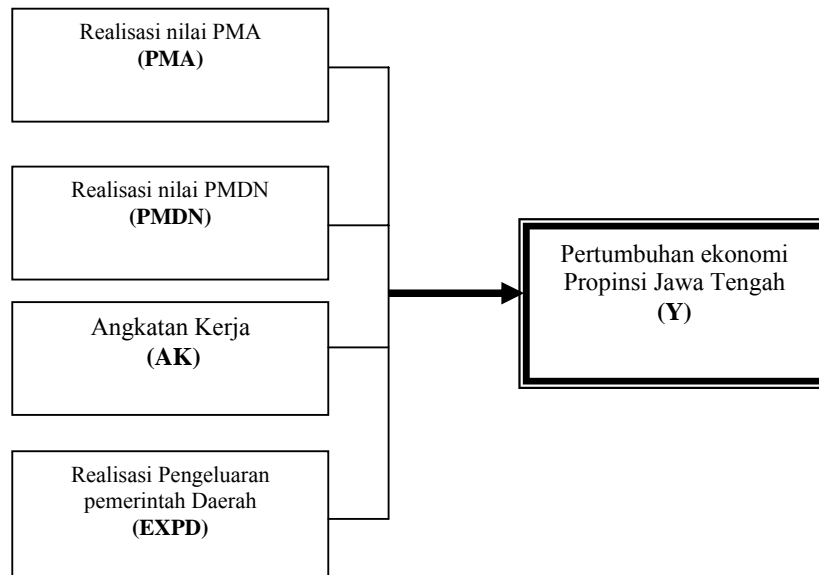
EXPD = Total pengeluaran pemerintah daerah

A = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien

Nilai realisasi PMA, PMDN, jumlah angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan 1985-1996 dijadikan variabel-variabel bebas yang secara parsial atau bersama-sama diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah. Skema hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Skema Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel-Variabel Yang Mempengaruhinya



2.8 Hipotesis

1. Diduga realisasi nilai PMA berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga realisasi nilai PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Diduga jumlah angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Diduga realisasi pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Beberapa definisi operasional variabel dalam penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut :

- a. **Produk Domestik Bruto** adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam waktu tertentu (Rupiah/tahun).

Data PDRB digunakan adalah PDRB Propinsi Jawa Tengah atas harga konstan tahun 2000 tanpa migas. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun 2000 sebagai tahun dasar.

Data PDRB dikeluarkan oleh BPS dan dinyatakan dalam satuan rupiah

- b. **Pertumbuhan ekonomi** : adalah perubahan relatif nilai riil Produk Domestik Bruto (PDRB) di Propinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam satuan persen

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2000) :

$$g_t = \frac{Y^r_t - Y^r_{t-1}}{Y^r_{t-1}} \times 100$$

Ket:

g_t = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t (%)

Y^r_t = pendapatan nasional (PDRB) riil pada tahun t (Rp)

Y^r_{t-1} = pendapatan nasional (PDRB) pada tahun
sebelumnya (Rp)

- c. **Angkatan Kerja** adalah jumlah penduduk usia kerja (berusia 10 tahun ke atas) yang bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang/jasa secara kontinu paling sedikit satu jam dalam seminggu (BPS, 2006) di Propinsi Jawa Tengah, dinyatakan dalam satuan orang
- d. **Realisasi nilai PMA** adalah realisasi penanaman modal asing (PMA) di Propinsi Jawa Tengah, dinyatakan dalam satuan Rupiah
- e. **Realisasi nilai PMDN** adalah realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Propinsi Jawa Tengah, dinyatakan dalam satuan Rupiah
- f. **Pengeluaran pemerintah daerah** adalah realisasi total belanja daerah di Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dinyatakan dalam satuan Rupiah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Tengah serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Secara rinci data yang dipergunakan :

1. **Pertumbuhan Ekonomi** : menggunakan data tentang pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2000. Data yang digunakan adalah data tahun 1985 s/d 2006, dinyatakan dalam persen (%).
2. **Variabel realisasi nilai PMA**: menggunakan data realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) di Propinsi Jawa Tengah , dinyatakan dalam juta rupiah.
3. **Variabel realisasi nilai PMDN**: menggunakan data realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Propinsi Jawa Tengah, dinyatakan dalam juta rupiah.
4. **Variabel Angkatan Kerja**: menggunakan data jumlah penduduk di Propinsi Jawa Tengah berusia 10 tahun ke atas yang bekerja , dinyatakan dalam satuan orang.
5. **Variabel pengeluaran pemerintah**: menggunakan data realisasi total belanja daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah,dinyatakan dalam juta rupiah.

Data yang digunakan adalah data sekunder selama periode tahun 1995 s/d 2006. Harga konstan dengan memakai tahun dasar 2000 digunakan sebagai dasar pengamatan dengan pertimbangan perkembangan angka-angka pendapatan regional dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh

perkembangan riil/nyata dan bukan dipengaruhi oleh perubahan harga, baik harga naik maupun turun (BPS, 2004). Pemutakhiran tahun dasar penghitungan PDRB dari tahun dasar 1993 ke tahun dasar 2000 menjadi perlu dilakukan agar hasil estimasi angka PDRB menjadi lebih realistis.

Sumber data yang digunakan :

1. Jawa Tengah dalam Angka tahun 1985 s/d 2006 BPS dan Bappeda Jawa Tengah;
2. PDRB Propinsi Jawa Tengah 1985 s/d 2006;
3. Angkatan Kerja Indonesia tahun 1985 s/d 2006;
4. Berita Resmi Statistik Propinsi Jawa Tengah, berbagai edisi terbitan;
5. Survey Penduduk Antar Sensus (Supas) berbagai tahun penerbitan;

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan. data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif regresi berganda.

3.4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan/ hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

3.4.1 Analisa Kuantitatif

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel realisasi penanaman modal asing (PMA), realisasi penanaman modal dalam negeri

(PMDN), jumlah angkatan kerja (AK) dan realisasi jumlah pengeluaran pemerintah (EXP) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati,2003).

Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Imam Ghazali, 2005).

3.4.1.1 Model Persamaan

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi produksi agregat standar :

$$Y = Ae^{\mu t} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(7)$$

$$Y = f(PMA, PMDN, AK, EXPD) \dots\dots\dots(8)$$

Model ekonometrika (Gujarati, 2003) :

$$Y = \beta_1 + \beta_2 PMA + \beta_3 PMDN + \beta_4 AK + \beta_5 EXPD + e \dots\dots\dots(9)$$

Dari persamaan (4) dan (5) diperoleh :

$$Y = A PMA^{\beta_1} PMDN^{\beta_2} AK^{\beta_3} EXPD^{\beta_4} \dots\dots\dots(10)$$

Untuk memperoleh linear bentuk persamaan (6) maka persamaan tersebut dilinearkan dengan menggunakan log, sehingga diperoleh:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 L_PMA + \beta_2 L_PMDN + \beta_3 L_AK + \beta_4 L_EXPD + e \dots \dots \dots (11)$$

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang terjadi selama masa pengamatan, yakni adanya krisis tahun 1997 maka digunakan variabel *dummy* krisis (D_t) dimana waktu waktu sebelum krisis (1985-1996) diberikan nilai 0 dan waktu sesudahnya (1997-2006) diberi nilai 1.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 L_PMA + \beta_2 L_PMDN + \beta_3 L_AK + \beta_4 L_EXPD + \beta_5 D_t + e \dots \dots \dots (12)$$

dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

L_PMA = Logaritma Realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA)

L_PMDN = Logaritma Realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

L_AK = Logaritma jumlah angkatan kerja

L_EXPD = Logaritma pengeluaran pemerintah daerah

D_t = *dummy* variabel untuk melihat pengaruh krisis ekonomi

1 untuk periode krisis ekonomi (1997-2006)

0 untuk periode di luar krisis ekonomi (1985-1996)

e = *error term*

β_0 = intersep

- β_1 = koefisien investasi asing (PMA)
- β_2 = koefisien investasi dalam negeri (PMDN)
- β_3 = koefisien angkatan kerja (AK)
- β_4 = koefisien pengeluaran pemerintah daerah (EXPD)
- β_5 = koefisien *dummy* krisis

3.4.1.2 Pengujian Hasil Persamaan Regresi

a. *Goodness of Fit* Suatu Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* suatu model persamaan regresinya. Pengukuran *goodness of fit* tersebut dapat dilakukan melalui nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

(1) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t statistik dengan t tabel. Dalam pengujian ini dilakukan dengan uji 2 sisi (*two tail test*) dengan tingkat kepercayaan 95 % atau $\alpha=5\%$ dengan hipotesis $H_0:\beta_0=\beta_1=\beta_2=0$ dan $H_a: \beta_0\neq\beta_1\neq\beta_2\neq 0$.

(2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara statistik bahwa koefisien regresi dari variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna dengan membandingkan nilai probabilitas (F-statistik) dengan F tabel, dengan ketentuan jika F-Statistik > F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama, dengan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_0: \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. $H_a: \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

(3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Secara umum koefisien untuk data silang (*cross section*) relatif lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

b. Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

(1) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang *perfect atau exact* di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila R^2 dari auxiliary regression melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai *varian inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas .

(2) Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i adalah tidak sama. Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data *cross section* dari pada *time series*. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode grafik *scatter plot*, uji White, dimana apabila nilai probabilitas (*p value*) observasi R^2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homoskedasitas.

(3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series* observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua

observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (*LM test*) dimana apabila probabilitas observasi $R^2 > \alpha$ (5 %), maka bebas dari autokorelasi

(4) Uji Linearitas

Uji terhadap linieritas berguna untuk mengetahui kebenaran bentuk model empiris yang digunakan dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan dalam model empiris. Dengan kata lain uji linier bermanfaat untuk mengetahui adanya kesalahan dalam spesifikasi model. Uji linier yang digunakan adalah Ramsey, dimana kriterianya bila probabilitas F hitung $> \alpha$ (5 %), maka spesifikasi model sudah benar.

(5) Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (*residual*) . Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat *normal probability plot* yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual.

c. Uji Chow (*Chow Test*)

Chow test adalah alat untuk menguji *test for equality of coefficients* atau uji kesamaan koefisien. Jika hasil observasi yang sedang diteliti dapat dikelompokkan menjadi dua atau lebih kelompok, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah kedua atau lebih kelompok tadi merupakan subyek proses ekonomi yang sama. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah model regresi linear dari penelitian empiris kedua kondisi, yakni kondisi sebelum dan sesudah krisis ekonomi adalah sama.

Tahap pengujian *Chow Test*:

- Periode penelitian dibagi dalam dua periode yaitu sebelum krisis, sebagai periode I dan sesudah krisis sebagai periode II
- Untuk tiap-tiap periode dihitung nilai koefisiennya dan nilai estimasi *Residual Sum of Squares (RSS)*. Nilai RSS periode I disebut S1 dan periode II disebut S2. Nilai S1 dan S2 dijumlahkan dan diberi notasi S3. Nilai RSS dari regresi keseluruhan diberi notasi S4, sedangkan selisih S4 dan S3 diberi notasi S5 ($S5 = S4 - S3$).
- Menghitung nilai F test dengan rumus :

$$F = \frac{S5 / k}{S3 / (n1 + n2 - 2k)}$$

- Kriteria penyimpulan :

Bila nilai F hit > nilai F tabel (signifikansi $\alpha = 5\%$) maka disimpulkan bahwa nilai koefisien (β) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

berbeda antara sebelum dan sesudah masa krisis

BAB IV
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. KONDISI GEOGRAFIS PROPINSI JAWA TENGAH

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Jawa yang terletak antara 5° 40' dan 8° 30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111° 30' Bujur Timur (termasuk Kepulauan Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Kepulauan Karimunjawa). Luas wilayah Jawa Tengah tahun 2006 tercatat sebesar 3.254.412 hektar. Batas wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Propinsi DIY dan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Propinsi Jawa Barat

Posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberi kerugian secara ekonomis karena menerima beban bagi arus lalu lintas yang ada.

Sampai dengan tahun 2006 Propinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi dalam 35 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota, yang terdiri dari 565 Kecamatan meliputi 8.568 desa dan 681 kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar (6,57% dari luas Jawa Tengah), sedang kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 37.367 hektar (1,15% dari 42.512 hektar (1,31%) dari luas Jawa Tengah)

sedang kota tersempit adalah kota Magelang dengan luas 1.812 hektar (0,06% dari luas Jawa Tengah).

B. KONDISI DEMOGRAFIS PROPINSI JAWA TENGAH

Jumlah penduduk di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 adalah sebesar 32.177.730 jiwa (Susenas BPS, 2006). Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat 989 jiwa setiap kilometer persegi dan rata-rata anggota rumah tangga menurut Kabupaten dan Kota sebesar 3,8 jiwa. Wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 12 ribu setiap kilometer persegi. Dengan demikian persebaran penduduk Jawa Tengah belum merata.

Jumlah penduduk tertinggi dan terendah pada tahun 2006 sama dengan tahun 2005, yaitu tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 1.765.564 jiwa (5,48% dari total penduduk Jawa Tengah) dan terendah di Kota Magelang sebanyak 129.952 jiwa (0,40%).

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2006 oleh BPS Propinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk laki-laki relatif seimbang bila dibandingkan dengan penduduk perempuan, yaitu masing-masing sebesar 16.054.473 jiwa (49,89%) penduduk laki-laki dan 16.123.257 jiwa (50,11%) penduduk perempuan sehingga rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah tahun 2006 sebesar Rp 99,57%

Struktur/komposisi penduduk Jawa Tengah menurut golongan umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan

proporsi terbesar adalah berada pada kelompok umur 10-14 tahun dan kelompok umur 5-9 tahun. Adapun perbandingan komposisi proporsi penduduk Propinsi Jawa Tengah menurut usia produktif pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Komposisi Penduduk Propinsi Jawa Tengah Menurut Usia Produktif Tahun 2002 s/d 2006 (dalam persen)

Kelompok Usia (Tahun)	Tahun											
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
0 -14	24,98	25,06	25,65	25,98	26,73	27,87	27,98	28,46	27,61	27,92	27,07	25,98
15 - 64	63,86	64,23	64,56	64,67	64,98	65,08	65,24	65,18	65,95	65,54	66,16	66,92
65 ke atas	6,02	6,03	6,07	6,12	6,26	6,32	6,34	6,36	6,43	6,54	6,77	7,09

Sumber : Susenas BPS Propinsi Jawa Tengah,2006

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa proporsi rata-rata penduduk Propinsi Jawa Tengah menurut kelompok umur di bawah 15 tahun selama tahun 1995-2006 adalah sebesar 26,7%, penduduk usia 15-64 tahun sebesar 59,87% dan penduduk usia lanjut (kelompok umur di atas 65 tahun) sebesar 6,36% dari total penduduk. Pertumbuhan penduduk usia muda (0-14 tahun) selama tahun rata-rata sebesar 0,38 %, penduduk usia produktif sebesar 0,42 % dan penduduk usia tua 1,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif makin tinggi proporsi maupun pertumbuhannya dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk usia tua yang semakin tinggi. Adanya krisis ekonomi tahun 1997 ternyata tidak mempengaruhi komposisi penduduk Propinsi Jawa Tengah secara berarti.

C. KONDISI PEREKONOMIAN JAWA TENGAH

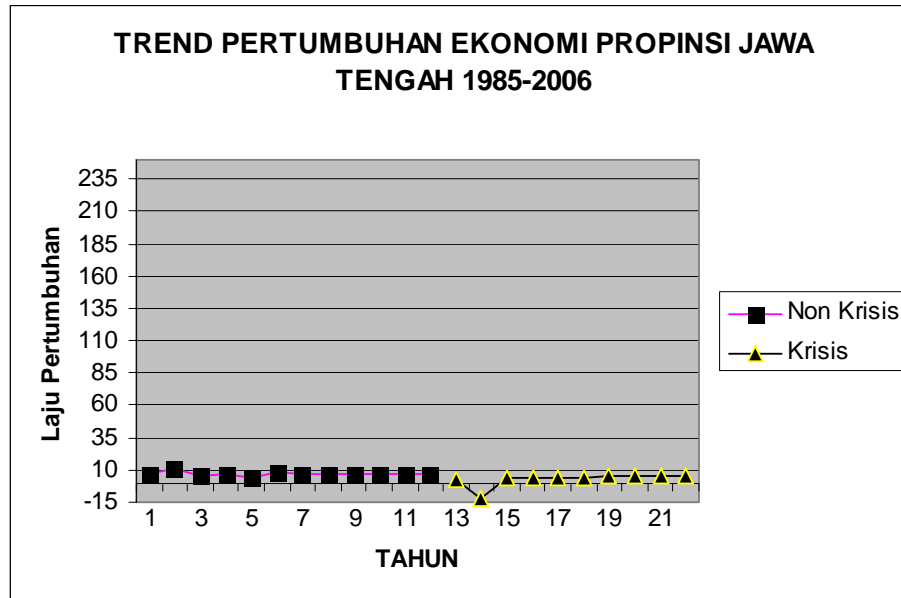
Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun berdasarkan atas harga konstan. Data laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah tahun 1985-2006 yang ditunjukkan oleh BPS Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat Tabel 4.2

Tabel 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1985 s/d 2006
(dalam persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1985	7,57
1986	11,65
1987	5,88
1988	6,35
1989	4,53
1990	8,98
1991	7,16
1992	7,44
1993	6,87
1994	6,96
1995	7,34
1996	7,30
1997	3,03
1998	-11,74
1999	3,49
2000	3,43
2001	3,59
2002	3,55
2003	4,98
2004	5,13
2005	5,35
2006	5,33

Sumber : PDRB Propinsi Jawa Tengah, berbagai tahun penerbitan, diolah

Gambar 4.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah 1985-2006



Sumber : Tabel 4.2, diolah

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah selama tahun 1985-1996 tidak terlalu fluktuatif. Pada periode sebelum krisis (1985-1997) pertumbuhan ekonomi relatif lebih stabil dibandingkan pada periode tahun 1997-1996. Selama tahun pengamatan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah rata-rata hanya tumbuh 0,24 % dengan pertumbuhan paling rendah pada tahun 1998 sebesar -11.74 % sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1997.

Tabel 4.3
Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Jawa Tengah
Tahun 1985 s/d 2006 (dalam juta Rupiah)

Tahun	PDRB		
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan	
		Tahun Dasar 1993	Tahun Dasar 2000
1985	9,176,650.00	8,473,000.00	107,549,250.00
1986	11,492,261.00	8,973,000.00	115,742,629.00
1987	13,593,745.00	9,450,000.00	114,929,961.00
1988	16,422,805.00	10,652,000.00	120,225,365.00
1989	18,692,151.00	11,340,000.00	105,193,864.00
1990	21,689,283.00	12,134,000.00	103,777,360.00
1991	25,980,442.00	13,002,000.00	99,472,093.00
1992	30,200,680.00	13,970,000.00	98,811,251.00
1993	33,978,909.00	33,397,900.00	97,750,525.00
1994	39,303,565.00	36,345,000.00	104,557,514.00
1995	40,718,022.00	39,013,000.00	98,096,983.00
1996	46,907,757.00	41,842,203.00	107,596,471.00
1997	53,179,130.00	43,129,838.00	109,434,464.00
1998	74,515,498.00	38,065,273.00	96,439,718.00
1999	83,420,926.00	39,394,513.00	113,331,644.00
2000	112,208,774.00	114,701,304.00	114,701,304.00
2001	133,110,065.00	118,816,400.00	118,816,400.00
2002	151,968,825.00	123,038,541.00	123,038,541.00
2003	171,881,877.00	129,166,462.00	129,166,462.00
2004	173,435,263.00	135,789,872.00	135,789,872.00
2005	234,435,323.00	143,051,213.00	143,051,213.00
2006	281,996,709.00	150,682,654.00	150,682,654.00

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Perkembangan pendapatan regional Propinsi Jawa Tengah periode 1985-2006 dapat dilihat pada Tabel 4.3. Pada periode sebelum krisis (tahun 1986-1996) PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar Rp 30.815.627 juta, lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan yang rata-rata Rp 23.859.120 juta. Pada masa periode krisis (1997-2006) PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku juga lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan yaitu rata-rata sebesar Rp 147.015.239 juta. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah, sedangkan PDRB

harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor dari tahun ke tahun.

D. KONDISI KETENAGAKERJAAN JAWA TENGAH

Jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam katagori bekerja pada tahun 1985 sebanyak 11.351.663 jiwa, meningkat menjadi 14.062.056 jiwa pada tahun 1995 dan 15.210.931 pada tahun 2006. Pertumbuhan penduduk katagori bekerja selama selang 10 (sepuluh) tahun tersebut rata-rata 17,5% jauh dari pertumbuhan jumlah penganggur.

Jumlah pengangguran di Propinsi Jawa Tengah terus meningkat selama tahun 1985, 1995 dan 2006 masing-masing sebesar 202.253 jiwa, 580.548 jiwa dan 1.197.244 jiwa atau rata-rata meningkat 146%.

Persentase mereka yang berada dalam golongan angkatan kerja disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja adalah kelompok orang yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan sudah diterima kerja tapi belum mulai bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk di Jawa Tengah terus menurun dari tahun 1985 sebesar 78,85% menjadi 56,25% (turun 22,6% poin) pada tahun 2006. Hal ini sangat tidak sejalan dengan banyaknya jumlah penduduk yang terus bertambah.

Tabel 4.4
Perkembangan Penduduk Usia 10 tahun ke atas Menurut Kegiatan Terbanyak di Jawa Tengah Tahun 1985, 1995, 2004, 2005, 2006

Kegiatan		1985	1995	2004	2005	2006
Angkatan Kerja (jiwa)	Bekerja	11.351.663	14.062.056	14.930.097	15.655.303	15.210.931
	Pengangguran	202.253	580.548	1.044.573	978.952	1.197.244
	Total	11.553.916	14.642.604	15.974.670	16.634.255	16.408.175
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	Sekolah	2.134.138	4.399.358	4.538.707	4.408.095	4.481.229
	Mengurus RT	28.747	3,133,938	4.252.463	4.133.181	4.233.527
	Lainnya	678.822	1,474,316	1.861.730	2.147.948	1.918.152
	Total	2.841.707	9.007.612	10.652.900	10.689.224	10.632.908
Total Penduduk 10 tahun+ (jiwa)		14.395.623	23.650.216	26.627.570	27.323.479	27.041.083
Tk.Pengangguran Terbuka (%)		1.75	3.96	6.54	5.89	7.30
Tk. Partisipasi AK (%)		78.85	59.46	56.07	57.30	56.25

Sumber : Susenas , Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Tingkat pengangguran terbuka yaitu angka yang menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terhadap 100 orang penduduk yang masuk katagori angkatan kerja meningkat dari 1,75 % pada tahun 1985 menjadi 7,30% di tahun 2006.

Kondisi ketenagakerjaan tersebut seyogyanya menjadi perhatian pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah, mengingat bahwa sumberdaya manusia sangat penting perannya dalam pembangunan. Manusia adalah agen-agen aktif penentu karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial politik karena bertindak sebagai pelaku aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengeksploitasi berbagai sumberdaya, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi, politik serta melaksanakan pembangunan itu sendiri.

E. KONDISI PENANAMAN MODAL DI JAWA TENGAH

Pembangunan daerah memerlukan investasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Untuk itu diperlukan pengerahan dana, tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan dana dari luar.

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial melalui penanaman modal, penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan berorganisasi dan manajemen sehingga membawa manfaat bagi daerah serta dapat menjamin kelangsungan pembangunan.

Investasi merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertamakali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta.

Peningkatan peran serta dalam pembangunan ekonomi dengan penyediaan porsi investasi lebih besar kepada swasta. Sasaran investasi sektor swasta pada dasarnya dipisahkan menjadi 2 (dua) yakni melalui PMA/PMDN serta investasi tanpa fasilitas PMA/PMDN (non PMA/PMDN). Investasi yang dilakukan oleh swasta tersebut merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan secara umum dan pembangunan ekonomi secara khusus.

Nilai realisasi investasi merupakan besarnya realisasi investasi dari proyek yang telah disetujui sebelumnya. Selama tahun 1985 s/d 2006 realisasi proyek dan investasi penanaman modal di Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN , PMA, Jumlah Proyek dan Tenaga Kerja yang Terserap di Jawa Tengah Tahun 1985 – 2006

Tahun	PMDN			PMA		
	Investasi (juta Rp)	Proyek (unit)	Tenaga Kerja (orang)	Investasi (Ribu US \$)	Proyek (unit)	Tenaga Kerja (orang)
1985	697.361,40	252	3.678,00	243.126,00	24	2.435,00
1986	737.795,00	269	2.456,00	425.766,00	26	2.229,00
1987	848.629,00	124	5.657,00	453.322,00	23	2.347,00
1988	1.076.869,00	132	5.643,00	637.905,00	32	2.567,00
1989	798.500,00	421	4.765,00	999.894,00	35	3.603,00
1990	5.799.280,94	466	5.234,00	1.143.599,00	43	5.890,00
1991	695.397,30	250	5.987,00	1.376.394,00	24	5.980,00
1992	1.370.565,72	31	6.234,00	1.794.185,00	6	5.670,00
1993	2.984.208,94	55	7.563,00	2.071.682,00	28	5.761,00
1994	6.729.769,00	54	7.987,00	2.653.037,00	22	5.456,00
1995	5.432.795,00	114	6.756,00	2.853.943,00	17	6.752,00
1996	4.508.586,00	75	5.658,00	3.023.502,00	17	5.786,00
1997	7.406.630,00	37	4.657,00	1.032.997,00	21	4.762,00
1998	2.482.396,00	43	3.568,00	2.466.243,00	23	2.870,00
1999	1.038.689,00	32	5.678,00	90.738,00	18	3.987,00
2000	2.451.203,00	13	8.786,00	100.692,00	17	6.879,00
2001	756.172,00	21	19.779,00	66.847,00	43	12.567,00
2002	777.116,97	35	2.906,00	73.435,00	56	13.897,00
2003	1.062.158,55	34	24.002,00	60.680,29	52	20.560,00
2004	1.900.000,00	36	10.441,00	504.630,00	50	8.889,00
2005	5.756.775,87	32	18.263,00	550.512,44	53	8.162,00
2006	5.067.314,48	35	22.086,00	381.668,71	52	20.443,00

Sumber : Badan Penanaman Modal (BPM) Propinsi Jawa Tengah

Nilai realisasi PMDN di Jawa Tengah relatif lebih stabil dibandingkan nilai realisasi PMA. Nilai PMDN yang berhasil terealisasi sepanjang tahun 1985-2006 sebesar Rp 60.378.213,17 juta dengan jumlah proyek sebanyak 2.561 unit, sedangkan nilai PMA dalam periode yang sama 23.004.798,15 US \$ dengan jumlah proyek sebanyak 682 unit. Dalam periode yang sama terlihat bahwa nilai realisasi PMDN rata-rata tumbuh 97,34% lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan realisasi nilai PMA sebesar 87,06%. Realisasi PMDN yang besar

ternyata juga menyerap tenaga kerja lebih besar dibanding PMA. Tercatat pada periode 1985-2006 PMDN di Propinsi Jawa Tengah mampu menyerap 187.784 orang, lebih tinggi daripada PMA yang menyerap 157.492 orang.

Tabel 4.6
Rata-Rata Nilai Investasi, Pertumbuhan Investasi, Jumlah Proyek dan Tenaga Kerja Terserap di Propinsi Jawa Tengah Periode 1985-1996 dan Periode 1997-2006

Tahun	PMDN				PMA			
	Investasi (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Proyek (unit)	Tenaga Kerja (orang)	Investasi (Ribu US \$)	Pertumbuhan (%)	Proyek (unit)	Tenaga Kerja (orang)
1985-1996	2.639.979	72,02	186	5.634	1.473.029	25,10	24	4.539
1997-2006	2.869.845	20,66	31	12.016	532.844	48,34	38	10.301

Sumber : Tabel 4.2, diolah

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sebelum krisis (periode tahun 1985-1996) rata-rata pertumbuhan nilai PMDN sebesar 72,02% dengan nilai nominal rata-rata sebesar Rp 2.639.979 juta. Sedangkan pada masa krisis nilai realisasi hanya tumbuh rata-rata sebesar 20,66% dengan nilai sedikit lebih besar dari periode sebelum krisis yaitu Rp 2.869.845 juta.

Berbeda dengan PMDN, rata-rata nilai realisasi PMA pada masa krisis cenderung rendah (532.844 Ribu US \$) dibanding dengan saat sebelum krisis yang mencapai 1.473.029 Ribu US \$. Meskipun demikian rata-rata pertumbuhan nilai PMA selama tahun 1997-2006 mencapai 48,34% lebih tinggi dari masa sebelum krisis yang hanya 25,10%. Secara umum adanya krisis ekonomi tahun 1997 mempengaruhi investasi terutama PMDN, hal ini terjadi karena para penanam

modal dari dalam negeri mengalami kerugian depresiasi nilai rupiah atas US dollar.

Menurut Basuki (1997), ada beberapa hal yang senantiasa harus diperhatikan untuk menarik para investor. Pertama, para investor biasanya sangat peka terhadap lingkungan sosial, politik, hukum, dan sistem birokrasi suatu daerah. Oleh sebab itu iklim investasi yang menyangkut aspek-aspek non ekonomi tersebut, harus dibangun sekondusif mungkin, karena lingkungan itu menjadi bahan pertimbangan awal investor untuk masuk atau tidaknya ke suatu daerah.. Penegakan hukum dan stabilitas politik juga harus menjadi perhatian utama. Krisis sektor riil dengan tingkat pengangguran yang luas dan permasalahan kemiskinan yang makin meningkat, disebabkan oleh kelemahan investasi yang masuk ke dalam sistem ekonomi, baik investasi domestik maupun asing.

Kedua, salah satu penentu daya tarik investasi yang utama adalah pemerintah dan kebijakannya. Sebab para investor selalu memantau peran suatu pemerintah dalam sistem ekonomi, serta perilaku dan tindakannya terhadap investor. Jika pemerintah dan kebijakannya tidak ramah terhadap investasi, sangat sulit aliran investasi masuk ke dalam perekonomian. Oleh karena itu pemerintah harus tetap merespon secara positif terhadap dunia usaha.

Ketiga, lembaga pelayanan dan sistem pelayanan sangat berpengaruh terhadap investasi. Tidak hanya itu, lembaga yang bertanggung jawab serta berwenang langsung terhadap investasi, sangat perlu melakukan program proaktif dalam mempromosikan keunggulan daerahnya sehingga terjadi peningkatan daya tarik investasi. Hambatan yang sering terjadi adalah kualitas pelayanan investasi yang

masih begitu rendah. Investor adalah raja bagi pemerintah yang sensitif dan berhati-hati terhadap perkembangan situasi ekonomi.

Keempat, pemerintah daerah harus berperan aktif secara maksimal dalam era otonomi daerah. Pemerintah daerah harus bersaing secara baik untuk meraih investasi asing maupun domestik. Namun penerapan otonomi daerah secara spasial belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga kurang menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Hal tersebut disebabkan masih kuatnya tarik menarik kepentingan antar tingkatan pemerintahan serta belum adanya pemahaman secara komprehensif tentang otonomi daerah. Selanjutnya pemerintah daerah harus menjadi motor untuk membangun iklim tersebut melalui kebijakan atraktif dan inovatif untuk investasi. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu membangun lembaga pelayanan dan system pelayanan yang modern dan efisien agar investor tertarik menanamkan modalnya di daerah. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah secara gencar mempromosikan keunggulan wilayahnya kepada para investor.

Sebagai upaya untuk menunjang dan mendukung usaha pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka dalam bidang pengembangan dunia usaha di Jawa Tengah telah ditempuh berbagai kebijakan dalam rangka menyediakan dan menciptakan iklim sejuk bagi bagi investor yang telah dicanangkan yang meliputi pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan serta penyediaan parasarana yang cukup antara lain:

1. Pelayanan perijinan-perijinan daerah melalui sistem pelayanan tunggal (*one stop service*) atas ijin-ijin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah, ijin HGB/HGU/HP dll;
2. Pelayanan perijinan/perpanjangan ijin kerja tenaga asing;
3. Penyediaan data potensi Jawa Tengah dan bentuk profil investasi serta profil proyek;
4. Penyediaan lokasi wilayah/kawasan industri untuk memudahkan pelian perencanaan dan penyediaan prasarana maupun upaya pengendalian pencemaran/limbah;
5. Penyediaan prasarana dan sarana fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan investor.

F. PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

Menurut Budiono (1981) pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output). Kedua, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) serta untuk investasi pemerintah (belanja pembangunan/barang-barang modal). Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Layaknya pengeluaran masyarakat maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui *multiplier*

effect dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat sehingga PDRB akan meningkat.

Sejak tahun 2004 sesuai dengan kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja, belanja rutin dan pembangunan tercermin dalam biaya aparatur maupun belanja pelayanan. Peran masing-masing belanja dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah selama tahun 1985-2006 dapat dilihat pada Tabel 4.7, dimana belanja rutin mempunyai persentase terhadap PDRB lebih besar (0,57%) dibandingkan dengan belanja pembangunan (0,22%). Pada tahun 1985-1996 terlihat bahwa porsi pengeluaran rutin rata-rata sebesar 0,48%, sedangkan pengeluaran pembangunan hanya 0,08%. Sejak krisis tahun 1997 hingga tahun 2006 alokasi pengeluaran rutin meningkat menjadi 0,74% dan pengeluaran pembangunan menjadi 0,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa krisis belanja pemerintah daerah terlihat lebih ekspansif, tetapi peningkatan ini didominasi oleh belanja rutin yang digunakan sebagian besar untuk belanja konsumtif seperti pembayaran gaji yang disebabkan adanya pengalihan pegawai yang dari status pegawai negeri pusat diperbantukan maupun dipekerjakan menjadi pegawai negeri daerah yang penggajiannya juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, pembayaran beban bunga hutang dan subsidi sehingga mengakibatkan penambahan pada sisi pengeluaran agregat relatif kecil apalagi jika kondisi ini tidak didukung oleh pembiayaan yang tepat maka akan memperbesar beban defisit anggaran.

Tabel 4.7

Belanja Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-1996 (dalam juta Rp)

Tahun	PDRB	Belanja Daerah			
		Rutin	%	Pembangunan	%
1985	107.549.250,00	263.378,00	0,24	32.659,00	0,03
1986	115.742.629,00	292.803,00	0,25	44.062,00	0,04
1987	114.929.961,00	331.896,00	0,29	44.280,00	0,04
1988	120.225.365,00	267.570,00	0,22	31.588,00	0,03
1989	105.193.864,00	240.752,00	0,23	58.406,00	0,06
1990	103.777.360,00	396.471,00	0,38	60.428,00	0,06
1991	99.472.093,00	432.042,00	0,43	84.239,00	0,08
1992	98.811.251,00	463.408,00	0,47	112.445,00	0,11
1993	97.750.525,00	553.805,00	0,57	123.675,00	0,13
1994	104.557.514,00	711.739,00	0,68	98.438,00	0,09
1995	98.096.983,00	960.972,00	0,98	131.636,00	0,13
1996	107.596.471,00	1.081.259,00	1,00	179.281,00	0,17
1997	109.434.464,00	1.210.312,00	1,11	249.828,00	0,23
1998	96.439.718,00	1.177.748,00	1,22	242.623,00	0,25
1999	113.331.644,00	411.172,00	0,36	176.548,00	0,16
2000	114.701.304,00	536.884,00	0,47	259.562,00	0,23
2001	118.816.400,00	542.949,00	0,46	314.330,00	0,26
2002	123.038.541,00	1.140.865,00	0,93	367.161,00	0,30
2003	129.166.462,00	1.263.237,00	0,98	869.916,00	0,67
2004	135.789.872,00	845.967,00	0,62	1.708.415,00	1,26
2005	143.051.213,00	820.818,00	0,57	776.353,00	0,54
2006	150.682.654,00	1.090.920,00	0,72	1.337.920,00	0,89
Rerata			0,57		0,22

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Salah satu indikator peran pemerintah daerah dalam pembentukan PDRB adalah rasio anggaran pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Semakin besar nilai rasio anggaran pengeluaran pemerintah terhadap PDRB berarti semakin besar peranan pemerintah dalam perekonomian daerah (pembentukan PDRB) dan makin kecil rasio maka makin peran pemerintah karena peranan sektor swasta daerah (PMA dan PMDN) dalam perekonomian daerah telah semakin besar.

Tabel 4.8
Proporsi Realisasi Belanja Daerah dan Investasi Swasta
Terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2006

No	Tahun	PDRB	Bel.Daerah	Investasi	EXPD/Y	I/Y
		(Y)	(EXPD)	(I)		
1	1985	107.549.250,58	296.037.000	2.188.831.361,00	2,75	20,35
2	1986	115.742.629,98	336.865.000	3.832.631.795,00	2,91	33,11
3	1987	114.929.961,33	376.176.000	4.080.746.629,00	3,27	35,11
4	1988	120.225.365,43	395.442.000	5.742.221.869,00	3,29	47,76
5	1989	105.193.864,07	299.158.000	8.999.835.500,00	2,84	85,55
6	1990	103.777.360,98	456.899.000	10.293.050.778,00	4,40	99,18
7	1991	99.472.093,11	516.281.000	12.388.241.397,00	5,19	124,54
8	1992	98.811.251,89	575.853.000	16.149.035.565,00	5,83	163,43
9	1993	97.750.525,87	677.480.000	18.648.122.208,00	6,93	190,77
10	1994	104.557.514,94	810.177.000	23.884.062.769,00	7,75	228,43
11	1995	98.096.983,74	109.260.8000	25.690.919.795,00	11,14	261,89
12	1996	107.596.471,65	1.260.540.000	27.216.026.586,00	11,72	252,95
13	1997	109.434.464,42	1.460.140.000	9.304.379.630,00	13,34	85,02
14	1998	96.439.718,36	587.720.000	22.198.669.396,00	6,09	230,18
15	1999	113.331.644,59	796.491.000	817.680.689,00	7,03	7,21
16	2000	11.4701.304,81	857.203.591	908.679.203,00	7,47	7,92
17	2001	118.816.400,29	1.508.024.892	602.3791.72,00	12,69	5,07
18	2002	123.038.541,13	2.146.833.408	661.692.116,97	17,45	5,38
19	2003	129.166.462,45	2.433.606.983	547.184.768,55	18,84	4,24
20	2004	135.789.872,31	2.572.554.359	4.543.570.000,00	18,95	33,46
21	2005	143.051.213,88	2.936.310.815	4.960.368.735,87	20,53	34,68
22	2006	150.682.654,74	4.001.820.000	3.440.085.704,48	26,56	22,83
Rerata					2,75	89,98

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, diolah

Rata-rata proporsi pengeluaran pemerintah Propinsi Jawa Tengah terhadap PDRB selama periode pengamatan tahun 1995-2006 rata-rata sebesar 2,75 % sampai 26,56 %. Rata-rata keseluruhan sebesar 9,86 % menunjukkan bahwa peran pengeluaran pemerintah Jawa Tengah dalam pembentukan PDRB-nya masih sangat kecil dibanding peran investasi swasta yang rata-rata proporsinya terhadap PDRB mencapai 89,98%.

Dari diskripsi di atas maka dapat dikatakan kebijakan fiskal dengan mempertajam prioritas pengeluaran dan membangkitkan investasi swasta adalah kunci stimulus dalam mendorong kenaikan permintaan agregat.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengujian Hasil Persamaan Regresi

Model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas.

Model utama

$$Y = \beta_0 a + \beta_1 L_PMA + \beta_2 L_PMDN + \beta_3 L_AK + \beta_4 L_EXP + \beta_5 D_t + e \dots\dots\dots(9)$$

dimana:

L_Y = Logaritma pertumbuhan ekonomi

L_PMA = Logaritma realisasi nilai Penanaman
Modal Asing (PMA)

L_PMDN = Logaritma realisasi nilai Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN)

L_AK = Logaritma jumlah Angkatan Kerja

L_EXP = Logaritma jumlah Pengeluaran Pemerintah

D_t = *Dummy* variabel krisis untuk melihat pengaruh
krisis ekonomi, 1 untuk periode krisis ekonomi (1997-
2006), 0 untuk periode di luar krisis ekonomi (1985-
1996)

e = *error term*

β₀, β₁... β₅ = konstanta

Pengujian untuk mengetahui pengaruh realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (EXPD) terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah dilakukan dengan analisis regresi berganda. Dengan analisis regresi akan diketahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dengan variabel independen : realisasi nilai PMA, PMDN dan pengeluaran pemerintah daerah. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisa regresi tersebut dinamakan *Ordinary Least Square* (OLS).

Menurut Gujarati (2003) asumsi utama yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan model OLS adalah:

1. Model regresi linear artinya linear dalam parameter : Y_i
 $= \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i$
2. Nilai X diasumsikan non stokastik, artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang
3. Nilai rata-rata kesalahan adalah nol, atau $E(u_i / X_i) = 0$
4. Homoskedastisitas, artinya varian kesalahan sama untuk setiap periode sama dan dinyatakan dalam bentuk matematis $Var(u_i / X_i) = \delta^2$
5. Tidak ada autokorelasi antar kesalahan (antara u_i dan u_j tidak ada korelasi)
6. Antara u_i dan X_i saling bebas, sehingga $Cov(u_i / X_i) = 0$
7. Jumlah observasi n , harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel bebas)
8. Adanya variabilitas dalam nilai X (nilai X harus berbeda)

9. Model regresi telah dispesifikasi secara benar atau tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisa empirik
10. Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antarvariabel bebas.

5.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil estimasi model utama persamaan linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\mathbf{PDRB = 0,247 + 0,945 \text{ Log AK} + 0,431 \text{ Log PMDN}}$$

SE	(0,073)	(0,296)	(0,129)
t_{hitung}	(3,350)	(3,185)	(3,343)

$$+ 0,486 \text{ Log PMA} + 0,504 \text{ Log EXPD} - 0,565 \text{ Dt}$$

(0,211)	(0,13)	(0,212)
(2,299)	(3,632)	(-2,232)

Keterangan :

$$R^2 = 0,901$$

$$\text{DW Test} = 2,119$$

$$F \text{ hit} = 4,499$$

$$\text{SE} = \textit{standart error}$$

Sebelum menginterpretasikan hasil persamaan regresi diatas, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian-pengujian sebagai berikut :

5.1.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien

Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS (Singgih Santoso, 2000) yang meliputi :

5.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak, maka pengujian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 11.5. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan penyebaran data (titik) pada *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode

selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan sebaran data yang menyebar disekitar garis diagonal pada “*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*” sesuai gambar di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

5.1.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*-nya. Nilai dari VIF yang kurang dari 10 dan *tolerance* yang lebih dari 0,10 maka menandakan bahwa tidak terjadi adanya gejala multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.

Tabel 5.1
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor (VIF)
Angkatan Kerja (AK)	0,361	2,771
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	0,344	2,909
Penanaman Modal Asing (PMA)	0,382	2,619
Total Pengeluaran Pemerintah (EXPD)	0,279	3,588
<i>Dummy</i> Krisis (Dt)	0,375	2,669

Dari perhitungan menggunakan program SPSS versi 11.0 dapat kita ketahui bahwa nilai VIF dan *tolerance* sebagai berikut :

1. Variabel Angkatan Kerja (AK) mempunyai nilai VIF sebesar 2,771 dan *tolerance* sebesar 0,361.
2. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai nilai VIF sebesar 2,909 dan *tolerance* sebesar 0,344.
3. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai nilai VIF sebesar 2,619 dan *tolerance* sebesar 0,382.
4. Variabel Pengeluaran Pemerintah (EXPD) mempunyai nilai VIF sebesar 3,588 dan *tolerance* sebesar 0,279.
5. Variabel *Dummy* Krisis (Dt) mempunyai nilai VIF sebesar 2,669 dan *tolerance* sebesar 0,375.

Dari ketentuan yang ada bahwa jika nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dan nilai-nilai yang didapat dari perhitungan adalah sesuai dengan ketentuan nilai

VIF dan tolerance, dan dari hasil analisis diatas dapat diketahui nilai toleransi semua variabel independen (AK, PMDN, PMA, EXPD, Dt) lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independennya tidak terjadi multikolinieritas sehingga model tersebut telah memenuhi syarat asumsi klasik dalam analisis regresi.

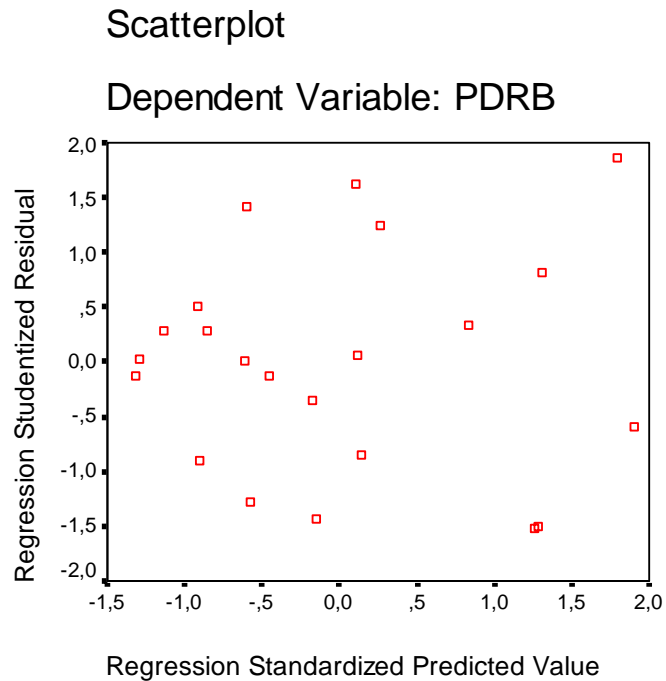
5.1.2.3. Uji Autokorelasi

Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS 11 diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson menunjukkan angka 1,928. Nilai dl dan du didapat dengan melihat tabel Durbin Watson dengan $n = 22$ dan $k = 5$. Nilai dl sebesar 1,01 dan nilai du sebesar 1,86. Oleh karena nilai DW 1,928 lebih besar dari batas atas (du) 1,86 dan kurang dari 4-1,86 ($dU < DW \leq 4 - dU$ atau $1,86 < 1,928 \leq 2,14$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 5.2
Hasil Pengujian Durbin Watson

Autokorelasi Negatif	Tanpa Kesimpulan	Tidak terdapat Autokorelasi	Tanpa Kesimpulan	Autokorelasi Positif
dL	dU	dW	4 - dU	4 - dL
0,01	1,86	1,928	2,14	2,99

5.1.2.4. Uji Heteroskedastisitas



Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS 11 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik yang menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol, pada sumbu Y serta tidak membentuk pola atau kecenderungan tertentu pada diagram plot, sehingga dapat mengidentifikasi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas dan model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi.

Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa model regresi yang memenuhi syarat uji asumsi klasik adalah dalam bentuk Logaritma.

5.1.3 Uji Chow

Analisis regresi dalam data dipengaruhi oleh adanya variabel *Dummy*, yaitu terjadinya krisis perekonomian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun tersebut. Pengaruh dari variabel *Dummy* mengakibatkan model regresi terbagi menjadi tiga persamaan yaitu persamaan pertama untuk periode I (1985-1996), persamaan kedua untuk periode II (1997-2006), dan persamaan III untuk keseluruhan data (1985-2006). Analisis regresi ini dilakukan dengan uji Chow Test yaitu untuk menguji *test for equality of coefficients* atau uji kesamaan koefisien.

Dari hasil perhitungan nilai *Restricted Residual Sum of Square* RSSr (RSS1) dari persamaan periode sebelum krisis sebesar 0,005 dengan $df = (n1-k) = 8$. Nilai RSS2 sebesar 0,001 dengan $df = (n2-k) = 6$. Dan nilai RSS3 sebesar 0,020 dengan $df = (n1+n2-k) = 18$. Jika nilai RSS2 dan RSS3 dijumlahkan, maka akan ditemukan nilai *Unrestricted Residual Sum of Square* (RSSur), yaitu :

$$\begin{aligned} \text{RSSur} &= \text{RSS2} + \text{RSS3} && \text{dengan } df = (n1+n2-2k) = 14 \\ &= 0,001 + 0,020 \\ &= 0,021 \end{aligned}$$

Langkah terakhir adalah menentukan nilai F test dengan rumus :

$$F = \frac{(\text{RSSr} - \text{RSSur}) / k}{(\text{RSSur}) / (n1 + n2 - k)}$$

$$F = \frac{(0,005 - 0,021)/4}{(0,021)/18}$$

$$F = 6,197$$

Nilai rasio F mengikuti distribusi F dengan K dan (n_1+n_2-2k) sebagai df untuk penyebut maupun pembilang. Jika F hitung $>$ F tabel, maka kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa model regresi sebelum krisis dan model regresi setelah krisis memang berbeda.

Dari tabel F dengan df = 4 dan 14 tingkat signifikansi 0.05 di dapat nilai F tabel 3,63. Oleh karena F hitung $>$ F tabel dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien dari variabel independen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah untuk periode sebelum dan sesudah krisis adalah berbeda. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sama antara kondisi sebelum dan sesudah krisis.

5.1.4 Uji Statistik

5.1.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi yang dapat lihat dari nilai R Square.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah yang disebabkan beberapa oleh beberapa faktor antara lain yaitu Angkatan Kerja (AK), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah Daerah (EXPD) dapat dilihat melalui besarnya koefisien determinasi. Dari perhitungan nilai R Square adalah 0,850. Hal ini berarti 85 persen perekonomian Propinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh kelima

variabel independen di atas, sedangkan sisanya yaitu 15 persen dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

5.1.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pada uji statistik secara parsial dengan nilai t kritis (*critical value*) pada $df=(n-k)$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen termasuk konstanta. Untuk menguji koefisien regresi parsial secara individu dari masing-masing variabel bebas akan diuji sebagai berikut:

a. Pengaruh Tenaga Kerja (TK) terhadap perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tahun 1985 – 2006.

Hipotesis yang diajukan adalah:

$H_0 = \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Angkatan Kerja (AK) terhadap perekonomian di Propinsi Jawa Tengah.

$H_1 = \beta_1 > 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Angkatan Kerja (AK) terhadap perekonomian di Propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk Angkatan Kerja (AK) sebesar 3,185 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729 . Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa Angkatan Kerja (AK) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0.006 atau probabilitas jauh di bawah 0.05, maka H_0 ditolak artinya Angkatan Kerja (AK) benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1985 – 2006.

b. Pengaruh realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tahun 1985 – 2006.

Hipotesis yang diajukan adalah:

$H_0 = \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

$H_1 = \beta_1 > 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 3,343 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729. Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0.001 atau probabilitas jauh di bawah 0.05, maka H_0 ditolak artinya bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1985 – 2006.

c. Pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tahun 1985-2006.

Hipotesis yang diajukan adalah:

$H_0 = \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

$H_1 = \beta_1 > 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 2,299 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729 . Terlihat

bahwa t hitung lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0.002 atau probabilitas jauh di bawah 0.05, maka H_0 ditolak artinya bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1985 – 2006.

d. Pengaruh realisasi nilai Pengeluaran Pemerintah (EXPD) terhadap perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tahun 1985–2006.

Hipotesis yang diajukan adalah:

$H_0 = \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan realisasi nilai Pengeluaran Pemerintah (EXPD) terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

$H_1 = \beta_1 > 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan realisasi nilai Pengeluaran Pemerintah (EXPD) terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk pertumbuhan realisasi nilai Pengeluaran Pemerintah (EXPD) sebesar 3,632 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729 . Terlihat

bahwa t hitung lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa realisasi nilai Pengeluaran Pemerintah (EXPD) berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0,006 atau probabilitas jauh di bawah 0.05, maka H_0 ditolak artinya bahwa realisasi nilai Pengeluaran Pemerintah (EXPD) benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah sejak tahun 1985 – 2006.

e. Pengaruh Variabel *Dummy* Krisis terhadap perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tahun 1985–2006.

Hipotesis yang diajukan adalah:

$H_0 = \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Krisis (Dt) terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

$H_1 = \beta_1 > 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Krisis (Dt) terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk Krisis (Dt) sebesar -2,654 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729 . Terlihat bahwa t hitung lebih kecil dari t kritis bawah, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa adanya Krisis (Dt) berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0.016 atau probabilitas jauh di bawah 0.05, maka H_0 ditolak artinya bahwa adanya Krisis (Dt) mempengaruhi perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tahun 1997–2006.

Akan tetapi pada kenyataannya, terjadinya krisis perekonomian di Indonesia tidak mempengaruhi perekonomian secara berarti terhadap perkembangan perekonomian Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat terjadi karena adanya mekanisme yang saling menutupi, misalnya pendapatan daerah dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dapat menanggulangi pengaruh negatif dari krisis.

5.1.4.3 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependent.

Uji Statistik secara serentak ditunjukkan oleh perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Nilai F tabel dengan $df = (k-1, n-k)$, dengan derajat kepercayaan sebesar 95 persen, adalah $F_{0,05, 5, 16}$ sebesar 2,81. Pada tabel 4.3 di atas terlihat bahwa pada persamaan, F hitung 4,499 adalah jauh lebih besar dari pada F tabelnya. Ini berarti bahwa kelima variabel independen signifikan dalam menjelaskan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah

5.2 Pembahasan

Beberapa pengujian telah dilakukan sebelumnya ternyata menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah baik, terbebas dari penyakit asumsi Klasik.

Interpretasi ekonomi dari persamaan yang diperoleh adalah:

1. Nilai konstanta sebesar 0,24 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24%. Angka sebesar itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.
2. Koefisien dari variabel realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) adalah 0,486 dan nilai tersebut adalah positif maka peningkatan realisasi PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah secara signifikan. Jika realisasi PMA naik 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah naik 0,486 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak birokrat Propinsi Jawa Tengah, untuk mengoptimalkan peningkatan PMA dengan memberikan iklim investasi yang lebih kondusif. Beberapa diantaranya dengan melakukan efisiensi perijinan atau regulasi kebijakan di bidang investasi, jaminan hukum

dan ketertiban berusaha, atau bahkan memberikan insentif dan atau *tax holiday* bagi investasi yang padat karya, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Basuki & Sulistyono (1997) dan Alkadri (1999) yang menyatakan bahwa penanaman modal asing berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

3. Koefisien dari variabel realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah 0,431 dan bernilai positif, maka peningkatan realisasi PMDN berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah secara signifikan. Jika realisasi PMDN naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah naik menjadi 0,431. Nilai PMDN yang ditanamkan di Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan lebih rendah baik dari sisi jumlah proyek maupun besarnya (lihat Tabel 1.3). Yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan PMDN di Jawa Tengah adalah aspek daya serap tenaga kerja. Hal itu penting mengingat masih begitu banyaknya angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan di Jawa Tengah.
4. Koefisien variabel dari Angkatan Kerja (AK) adalah 0,945 dan nilai ini adalah positif, maka pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah secara signifikan. Jika AK naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah naik menjadi 0,945 %. Angka elastisitas tenaga kerja ini memberikan sinyal bahwa kontribusi angkatan kerja di Jawa Tengah bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya industri di Jawa Tengah yang bersifat padat karya dan banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan

perdagangan (lihat Tabel 1.5). Sumber daya manusia (SDM) tidak saja penting dari sudut kuantitas, tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitasnya. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal, dan dapat saja diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Hasil regresi yang menunjukkan koefisien elastisitas yang tinggi dari angkatan kerja dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini seyogyanya tidak di-intrepretasikan secara matematis, karena meskipun angkatan kerja Jawa Tengah secara nominal meningkat dari tahun ke tahun tetapi angkatan kerja tersebut kualitasnya masih belum memadai untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB.

5. Koefisien variabel dari realisasi Total Pengeluaran Pemerintah (EXPD) adalah 0,504 dan bernilai positif, maka pertumbuhan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah secara signifikan. Jika EXPD naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah naik menjadi 0,504 %. Tampak dari angka elastisitas itu, peranan APBD Jawa Tengah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cukup signifikan terutama dari sudut pengeluaran, baik pengeluaran yang sifatnya program, proyek maupun rutin. Menurut Susanti (1995) pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. Kaidah ini dikenal sebagai hukum Wagner, yaitu adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional.

6. *Dummy* krisis (D_t) menunjukkan hasil yang signifikan pada level 5%. Variabel *dummy* ini menunjukkan bukti adanya perbedaan pengaruh antara masa sebelum krisis (1985-1996) dan masa sesudah krisis (1997-2006). Hasil signifikan dengan tanda negatif (- 0,565) membuktikan bahwa pengaruh keadaan krisis sangat kecil perannya dalam model. Dengan menganggap semua variabel lain konstan, jika terjadi krisis maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,565%. Sebaliknya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak akan mengalami perubahan (meningkat atau menurun) dengan asumsi variabel lain tetap jika tidak terjadi krisis.

Krisis ekonomi pada Juli 1997 ditandai dengan anjloknya nilai rupiah terhadap dollar AS berkisar antara 300% - 500% dari nilai kurs awal tahun 1997 sebesar Rp 2.500,- per US \$ 100.

Masa ini ditandai dengan :

- menurunnya daya beli secara drastis
- lenyapnya minat investasi
- meningkatnya kapasitas menganggur di berbagai sektor

Kondisi tersebut diperparah oleh sisi penawaran yang juga turun. Bukan saja produksi yang merosot sejalan dengan merosotnya permintaan tetapi juga terjadi kerusakan kelembagaan yang relatif akut sehingga menyebabkan daya respon (elastisitas) penawaran sangat lemah.

Berdasarkan Tabel 5.3 maka dapat dijelaskan hasil persamaan regresi dengan memasukkan variabel *dummy* krisis (D_t) dapat digambarkan bahwa :

- Pengaruh angkatan kerja (AK) terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan adalah positif dan signifikan, dengan elastisitas angkatan kerja sebesar 0,631 sebelum krisis dan 0,123 sesudah krisis. Berarti terjadi penurunan nilai elastisitas angkatan kerja. Makin menurunnya elastisitas angkatan kerja berarti makin menurunnya produktivitas angkatan kerja. Hal ini terjadi karena dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menciptakan krisis multidimensial mengakibatkan daya beli masyarakat relatif tetap bahkan cenderung turun. Keadaan ini ditunjukkan dengan dengan menurunnya permintaan atas barang dan jasa yang diproduksi, sehingga perusahaan cenderung mempertahankan kapasitas produksinya atau bahkan menurunkannya. Untuk menjaga tingkat keuntungan yang diperoleh maka idealnya perusahaan melakukan rasionalisasi jumlah tenaga kerjanya sehingga efisiensi dapat dipertahankan. Namun di sisi lain, bersamaan dengan krisis muncul pula era reformasi yang menyebabkan kemampuan tawar pekerja/buruh terhadap pihak perusahaan makin kuat. Hal ini menyebabkan pengusaha tidak dengan mudah mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjaannya. Solusi tengah pengusaha melakukan kebijakan pengurangan jam kerja yang mengakibatkan penurunan produktivitas angkatan kerja dan selanjutnya berimbas pada penurunan pertumbuhan PDRB. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
- Pengaruh realisasi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan adalah positif dan signifikan. Elastisitas PMA pada saat sebelum

krisis sebesar 0,371 dan saat krisis sebesar 0,058, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan elastisitas. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sejak krisis aliran modal asing yang masuk menjadi bumerang karena telah menjadi arus balik yang membahayakan baik terhadap nilai tukar rupiah maupun terhadap perekonomian makro, berupa peningkatan beban bunga dan cicilan okok utang luar negeri, pengganguran dsb. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepekaan PMA dalam kontribusinya terhadap pembentukan output daerah menjadi rendah.

- Pengaruh realisasi PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan adalah positif dan signifikan namun tidak begitu besar koefisiennya dibanding dengan variabel dependen lainnya. Pada saat sebelum krisis nilai koefisiennya 0,214 sedangkan saat krisis turun menjadi 0,098. Sehingga dapat dikatakan bahwa PMDN belum dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah. Meskipun sebagian PMDN menanamkan modal untuk sektor industri pengolahan ditenggarai masih berkandungan lokal rendah. Hal ini meyebabkan nilai tambah yang diperoleh dari industri tersebut dibelanjakan kembali untuk pemenuhan faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri, akibatnya nilai tambah yang diperoleh berkurang dan tidak berdampak pada nilai PDRB.
- Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan adalah positif dan signifikan. Dalam konsep ekonomi makro pengeluaran pemerintah akan meningkatkan perekonomian nasional. Pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian ini tentunya dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah digunakan

sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi atau yang memberikan dorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi. Jadi apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Koefisien elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi saat sebelum krisis sebesar 0,140. Sedangkan sesudah krisis naik menjadi 0,577, artinya peran perubahan pengeluaran pemerintah daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah makin tinggi.

Tabel 5.3
Rangkuman Perhitungan Model Regresi Hasil Penelitian

Variabel	Koefisien	t-hit	Probabilitas	Signifikansi
Hasil Persamaan Regresi dengan memasukkan Variabel Dummy Krisis (D_t)				
<i>Constant</i>	.247	3.350	.004	***
AK	.945	3.185	.006	***
PMDN	.431	3.343	.001	***
PMA	.486	2.299	.002	***
EXP	.504	3.632	.006	***
D_t	-.565	-2,654	.016	***
Adj $R^2 = 0,850$ F hit = 7,111 DW = 1,928				
Hasil Persamaan Regresi dengan periode Sebelum Krisis (untuk uji Chow)				
<i>Constant</i>	,213	4,164	,002	***
AK	,284	4,577	,000	***
PMDN	,109	2,474	,002	***
PMA	,263	3,655	,001	***
EXP	,261	,299	,004	***
Adj $R^2 = 0,230$ F hit = 4,822 DW = 1,892 RSS = 0,005				
Hasil Persamaan Regresi dengan periode Sesudah Krisis (untuk uji Chow)				
<i>Constant</i>	-1,025	-1,016	,002	***
AK	,123	2,019	,034	***
PMDN	,098	3,903	,008	***
PMA	,058	3,395	,009	***
EXP	,577	2,722	,000	***
Adj $R^2 = 0,925$ F hit = 10,108 DW = 2,805 RSS = 0,001				
Hasil Persamaan Regresi Keseluruhan (untuk uji Chow)				
<i>Constant</i>	,206	3,616	,001	***
AK	,631	2,195	,042	***
PMDN	,214	4,190	,003	***
PMA	,371	3,001	,002	***
EXP	,140	2,917	,031	***
Adj $R^2 = 0,537$ F hit = 3,815 DW = 1,939 RSS = 0,020				

Sumber : data yang diolah

Ket *** = signifikan pada derajat $\alpha = 0,05$

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian mengenai pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 1985-2006 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah (Y) selama tahun pengamatan 1985-2006 adalah : realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan Kerja (AK) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (EXPD). Hasil analisis mengenai pengaruh PMA, PMDN, Angkatan Kerja dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Sedangkan penambahan variabel *dummy* krisis menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Adanya krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan perbedaan yang nyata antara keadaan sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi dan memberikan dampak yang negatif atau menyebabkan penurunan kapasitas output.

3. Penurunan elastisitas PMA dan PMDN saat krisis disebabkan pada saat krisis ekonomi proyek-proyek padat modal sebagian besar jatuh. Elastisitas Angkatan Kerja (AK) di Jawa Tengah pada masa sesudah krisis menurun disebabkan⁹⁵ karena semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia, sehingga produktivitas tenaga menjadi tidak optimal dalam menghasilkan output. Hal ini menyebabkan pengangguran terselubung yang ada di Jawa Tengah semakin besar.
4. Elastisitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi relatif meningkat pada saat terjadi krisis sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat ekspansif untuk mendorong kenaikan permintaan agregat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya perlu dilakukan untuk mengerakkan pembangunan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah antara lain :

1. Meskipun secara kuantitas angkatan kerja memberi kontribusi yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, seyogyanya disertai dengan upaya peningkatan kualitas angkatan kerja oleh pemerintah daerah, misalnya dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.
2. Peranan PMA dan PMDN sesuai dengan semangat otonomi daerah harus dipacu dengan peningkatan situasi kondusif berinvestasi,

pembuatan peta potensi daerah dan pembentukan unit pelayanan terpadu di daerah untuk mempermudah pelayanan pembuatan ijin usaha dan investasi, contoh seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen.

3. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah diharapkan mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2005. **Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2005**. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Anonimous, 2006. **Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2006**. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Semarang
- Anonimous, 2006. **Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2007**. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Semarang
- Anonimous, 2008. **Berita Resmi Statistik**. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Semarang
- Arsyad, Lincoln. 1999. **Ekonomi Pembangunan**. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta
- Alkadri, 1999. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, **Jurnal Pusat Studi Indonesia**, Universitas Terbuka
- Basuki, 1997. Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia Tahun 1969-1994. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia** Vol.12,2,50-65, Universitas Gajah Mada, 1997
- Gujarati, Damodar. 1995. **Basic Econometrics.Third Edition**. McGraw Hill International Editions.
- Gunadi Brata, Aloysius.2004. **Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tk.II di Indonesia**. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. **Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan**. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Mankiw, N.Gregory.2000.**Teori Makro Ekonomi**.Ed.4, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pancawati, Neni, 2000. Pengaruh Rasio Kapital-Tenaga Kerja, Tingkat pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat

Pertumbuhan GDP Indonesia ; **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia** Vol.15, No.02, Universitas Gajah Mada, 2000

Prasasti, Diah, 2006. Perkembangan PDRB per kapita 30 Propinsi di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi ; **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia** Vol.21, No.4, Universitas Gajah Mada, 2006

Ranis, Gustav. et. al. 2000. Economic Growth and Human Development. **World Development** Vol.28, No.2, pp.197-219, 2000

Sumodiningrat, Gunawan. 2002. **Pengantar Ekonometrika**. BPFE- UGM. Yogyakarta

Yuliarmi, Nyoman. 2008. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali ; **Bulletin Studi Ekonomi Vo.13 No.2 Tahun 2008**, Universitas Udayana Denpasar.

Sukirno, Sadono. 2000 **Makroekonomi Modern**: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Raja Grafindo Pustaka

Suryana, 2000. **Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan**. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama, 2000.

Sinung, Noegroho dkk, 2007. Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional; **Proceedings Seminar** tentang Urban & Regional UI, 2007

Susetyo, Didiék. 2001. Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi; **Kajian Ekonomi dan Bisnis Vol.3 No.1 Tahun 2001**, Universitas Sriwijaya

Susanti, Hera, Moh.Ihsan dan Widyanti. 1995. **Indikator-Indikator Makroekonomi**, Jakarta, LPEM-FE-UI

Todaro , Michael. 2004. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004

Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia** Vol.02, Universitas Gajah Mada, 2005

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Deddy Rustiono
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 19 Juni 1973
Alamat : Randusari Pos 2/330 Semarang
Telepon : 0815 66 27 288
Instansi : Universitas Negeri Semarang

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semarang
2. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang
3. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Lampiran 1

**DATA MENTAH PERTUMBUHAN PDRB, AK, PMDN, PMA, EXPD
TAHUN 1985 - 2006**

No	Tahun	Y	AK	PMDN	PMA	EXPD	Dun kri
		$\frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100$	AK yg Bekerja	Realisasi PMDN	Realisasi PMA	Total Realisasi Belanja Daerah	
		%	(orang)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	
1	1985	7,57	11.351.663,00	697.361,00	1.384.261.585,00	296.037,00	(
2	1986	11,65	11.332.077,00	737.795,00	1.465.260.870,00	336.865,00	(
3	1987	5,88	12.866.665,00	848.629,00	1.686.225.823,00	376.176,00	(
4	1988	6,35	13.745.669,00	1.076.869,00	2.140.815.572,00	395.442,00	(
5	1989	4,53	13.413.619,00	789.500,00	1.570.315.500,00	299.158,00	(
6	1990	8,98	13.735.977,00	659.778,00	1.312.958.220,00	456.899,00	(
7	1991	7,16	13.823.208,00	695.397,00	1.384.535.427,00	516.281,00	(
8	1992	7,44	14.500.549,00	1.370.565,00	2.730.165.480,00	575.853,00	(
9	1993	6,87	14.597.829,00	2.984.208,00	5.947.526.544,00	677.480,00	(
10	1994	6,96	14.394.167,00	6.729.769,00	13.419.159.386,00	810.177,00	(
11	1995	7,34	14.642.604,00	5.432.795,00	10.838.426.025,00	1.092.600,00	(
12	1996	7,30	14.394.169,00	4.508.586,00	8.999.137.656,00	1.260.540,00	(
13	1997	3,03	14.405.167,00	7.406.630,00	14.791.040.110,00	1.460.140,00	:
14	1998	(11,74)	14.949.263,00	2.482.396,00	4.959.827.208,00	587.720,00	:
15	1999	3,49	15.433.245,00	1.038.689,00	2.076.339.311,00	796.491,00	:
16	2000	3,43	15.129.122,00	2.451.203,00	4.902.406.000,00	857.204,00	:
17	2001	3,59	15.066.542,00	756.172,00	1.513.100.172,00	1.508.025,00	:
18	2002	3,55	14.751.088,00	777.116,97	1.555.788.174,00	2.146.833,00	:
19	2003	4,98	15.196.265,00	1.062.158,55	2.127.503.576,00	2.433.607,00	:
20	2004	5,13	14.930.097,00	1.900.000,00	3.807.600.000,00	2.572.554,00	:
21	2005	5,35	15.655.303,00	5.756.775,87	11.542.335.619,00	2.936.311,00	:
22	2006	5,33	15.210.931,00	5.067.314,48	10.165.032.847,00	4.001.820,00	:

Sumber :

PDRB : Jawa Tengah Dalam Angka, PDRB Propinsi Jawa Tengah (BPS Prop.Jateng) berbagai tahun penerbitan

AK : Jawa Tengah Dalam Angka, Susenas (BPS Prop.Jateng) berbagai tahun penerbitan

PMDN : Jawa Tengah Dalam Angka (BPS Prop.Jateng), Badan Koord Penanaman Modal Daerah (BPKMD) Prop.Jateng

PMA : Jawa Tengah Dalam Angka (BPS Prop.Jateng), Badan Koord Penanaman Modal Daerah (BPKMD) Prop.Jateng
EXPD : Jawa Tengah Dalam Angka (BPS Prop.Jateng), berbagai tahun penerbitan

Lampiran 2

**DATA LOGARITMA PDRB, AK, PMDN, PMA, EXPD
TAHUN 1985 - 2006**

Y	L_AK	L_PMDN	L_PMA	L_EXPD	Dummy
PDRB (%)	AK yang Bekerja (orang)	Realisasi PMDN (Juta Rp)	Realisasi PMA (Rupiah)	Total Belanja Daerah (Ribu rupiah)	Krisis
7,57	16,24	13,46	2,79	19,51	0
11,65	16,24	13,51	2,79	19,64	0
5,88	16,37	13,65	2,80	19,75	0
6,35	16,44	13,89	2,80	19,80	0
4,53	16,41	13,58	2,80	19,52	0
8,98	16,44	13,40	2,80	19,94	0
7,16	16,44	13,45	2,80	20,06	0
7,44	16,49	14,13	2,80	20,17	0
6,87	16,50	14,91	2,80	20,33	0
6,96	16,48	15,72	2,80	20,51	0
7,34	16,50	15,51	2,80	20,81	0
7,30	16,48	15,32	2,80	20,95	0
3,03	16,48	15,82	2,80	21,10	1
(11,74)	16,52	14,72	2,80	20,19	1
3,49	16,55	13,85	2,81	20,50	1
3,43	16,53	14,71	2,81	20,57	1
3,59	16,53	13,54	2,81	21,13	1
3,55	16,51	13,56	2,80	21,49	1
4,98	16,54	13,88	2,81	21,61	1
5,13	16,52	14,46	2,80	21,67	1
5,35	16,57	15,57	2,81	21,80	1
5,33	16,54	15,44	2,81	22,11	1

Sumber : data mentah

REGRESSION

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Krisis, L_PMA, L_PMDN, L_AK , L_EXPD (a)	.	Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: Y

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,920(a)	,850	,593	,08014	1,928

a Predictors: (Constant), L_EXPD, L_PMA, L_AK, L_PMDN
b Dependent Variable: Y

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,985	5	,046	7,111	,001(a)
	Residual	,652	16	,006		
	Total	,642	21			

a Predictors: (Constant), Krisis, L_PMA, L_PMDN, L_AK, L_EXPD
b Dependent Variable: Y

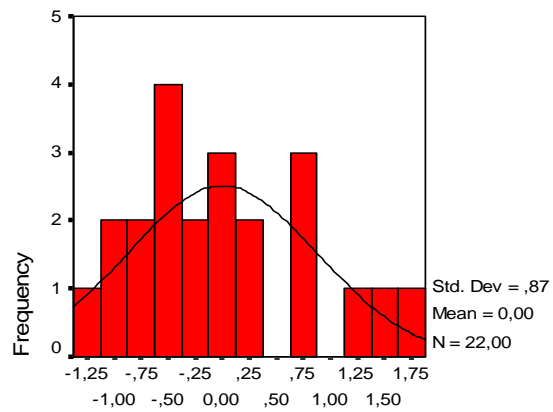
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,247	,073		3,350	,004		
	L_AK	,945	,296	,020	3,185	,006	,361	2,771
	L_PMDN	,431	,129	,358	3,343	,001	,344	2,909
	L_PMA	,486	,211	,015	2,299	,002	,382	2,619
	L_AK	,504	,138	,307	3,632	,006	,279	3,588
	Krisis	-,565	,212	-,232	-2,654	,016	,375	2,669

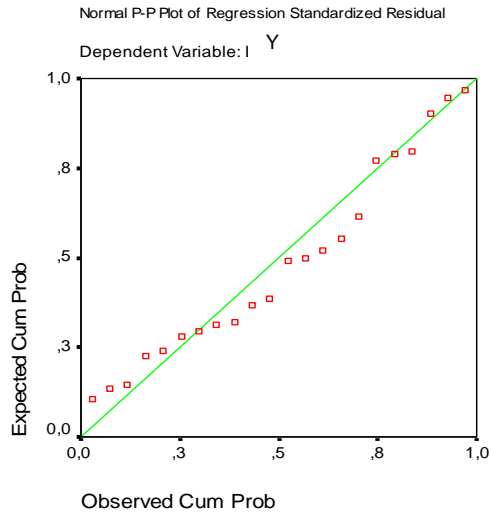
a. Dependent Variable: Y

Histogram

Dependent Variable: Y



Grafik Normal Probability Plot



Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		22
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,06785324
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,121
	Negative	-,065
Kolmogorov-Smirnov Z		,536
Asymp. Sig. (2-tailed)		,722

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

UJI CHOW

1. Pada periode tahun 1985 – 1996

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	L_EXPDP, L_AK, L_PMDN, L_PMA(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Y

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,892(a)	,795	,230	,02631	1,892

a Predictors: (Constant), L_EXPDP, L_AK, L_PMDN, L_PMA

b Dependent Variable: Y

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,005	4	,001	4,822	,229(a)
	Residual	,005	7	,001		
	Total	,010	11			

a Predictors: (Constant), L_EXPDP, L_AK, L_PMDN, L_PMA

b Dependent Variable: Y

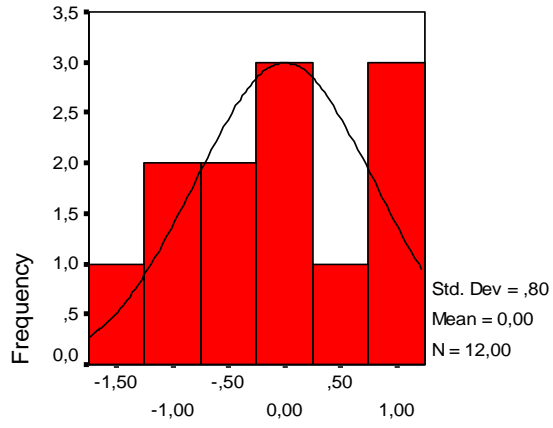
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,213	0,05		4,164	,002		
	L_AK	,284	,062	,351	4,577	,001	,192	5,217
	L_PMDN	,109	,044	,272	2,474	,002	,214	4,674
	L_PMA	,263	,072	,445	3,655	,001	,081	12,393
	L_EXPDP	,261	,109	,299	2,390	,004	,111	9,015

a Dependent Variable: Y

Histogram

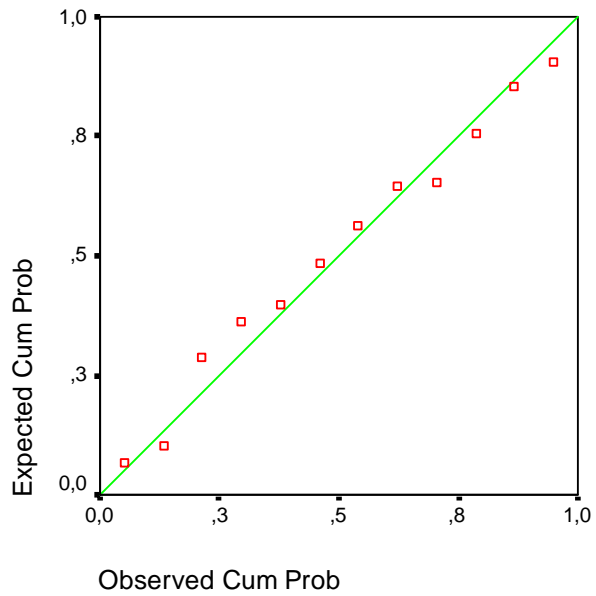
Dependent Variable Y



Regression Standardized Residual

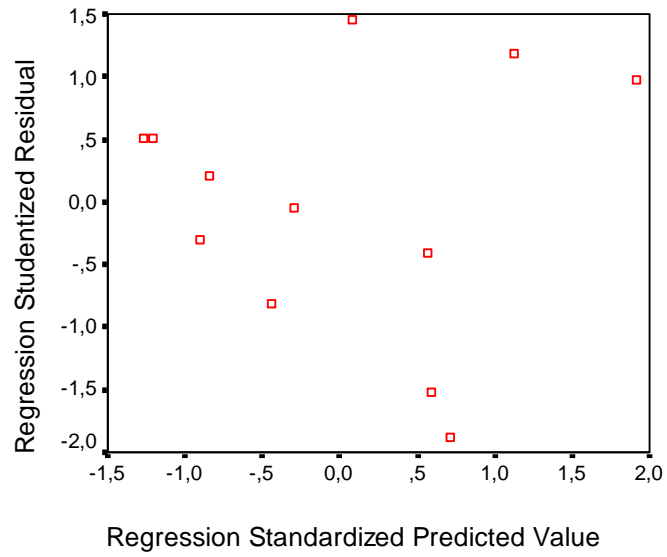
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable Y



Scatterplot

Dependent Variable Y



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,91782515
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,336
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

2. Pada Periode Tahun 1997 – 2006

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	L_EXPD, L_AK, L_PMDN, L_PMA(a)	.	Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: Y

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,979(a)	,958	,925	,01646	2,805

a Predictors: (Constant), L_EXPD, L_AK, L_PMDN, L_PMA
b Dependent Variable: Y

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,031	4	,008	10,108	,043(a)
	Residual	,001	5	,000		
	Total	,032	9			

a Predictors: (Constant), L_EXPD, L_AK, L_PMDN, L_PMA
b Dependent Variable: Y

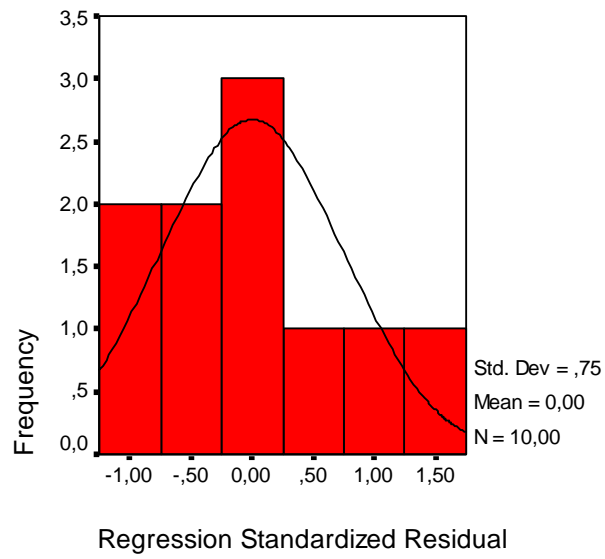
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,025	,546		-1,876	,002		
	L_AK	,123	,061	,302	2,019	,034	,765	1,308
	L_PMDN	,098	,025	,137	3,903	,008	,365	2,736
	L_PMA	,058	,017	,064	3,395	,009	,318	3,140
	L_EXPD	,577	,212	,869	2,722	,000	,816	1,225

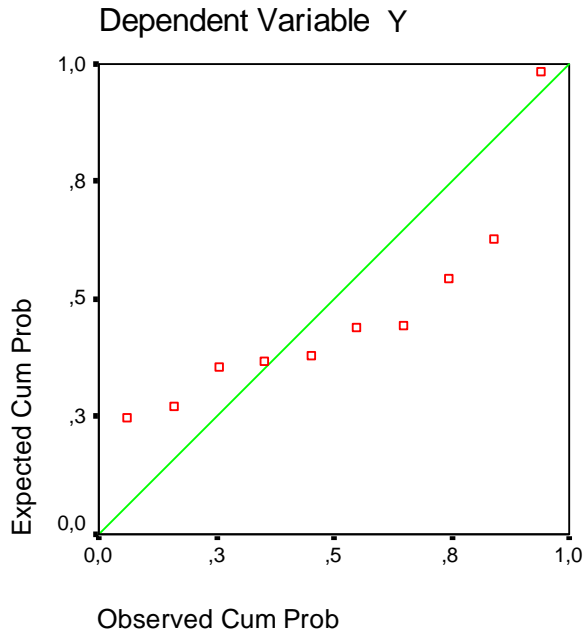
a Dependent Variable: Y

Histogram

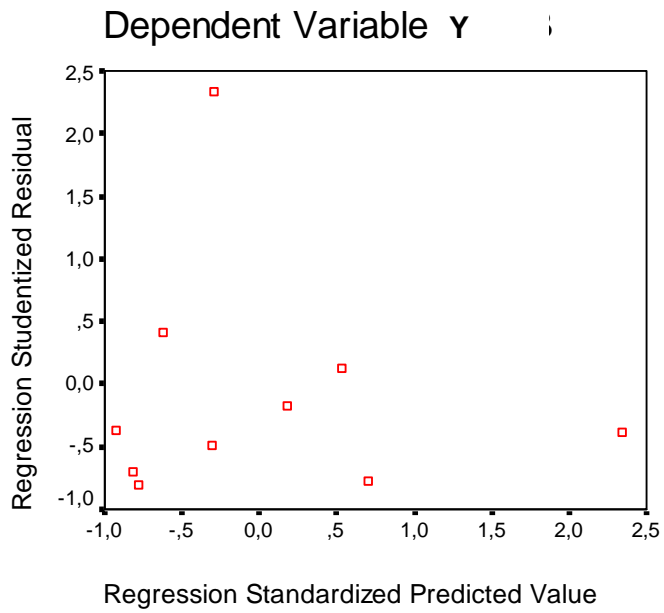
Dependent Variable: Y



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17895875
Most Extreme Differences	Absolute	,251
	Positive	,251
	Negative	-,200
Kolmogorov-Smirnov Z		,836
Asymp. Sig. (2-tailed)		,457

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

2. Pada Periode tahun 1985 – 2006

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	L_EXPD, L_PMA, L_AK L_PMDN(a)		Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: Y

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,888(a)	,768	,545	,0376	1,987

a Predictors: (Constant), L_EXPD, L_PMA, L_AK, L_PMDN
b Dependent Variable: Y

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,015	4	,724	3,815	,002(a)
	Residual	,009	17	,016		
	Total	,003	21			

a Predictors: (Constant), L_EXPD, L_PMA, L_AK, L_PMDN
b Dependent Variable: Y

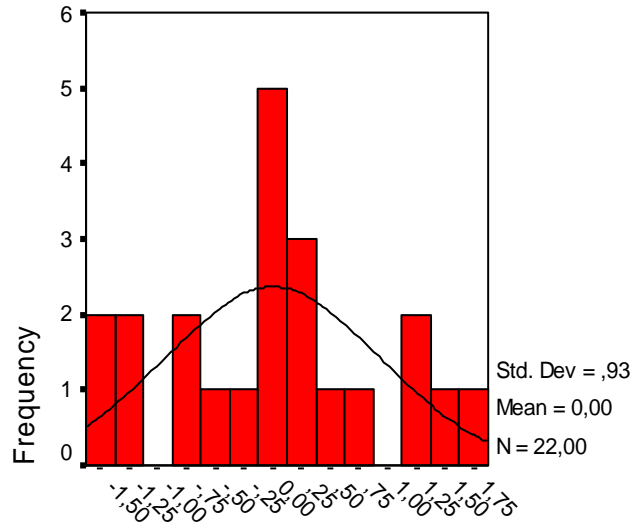
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,206	,056		3,616	,001		
	L_AK	,631	,287	,427	2,195	,042	,477	2,094
	L_PMDN	,214	,051	,442	4,190	,003	,774	2,292
	L_PMA	,371	,124	,405	3,001	,002	,321	1,875
	L_EXPD	,140	,048	,315	2,917	,031	,557	2,797

a Dependent Variable: Y

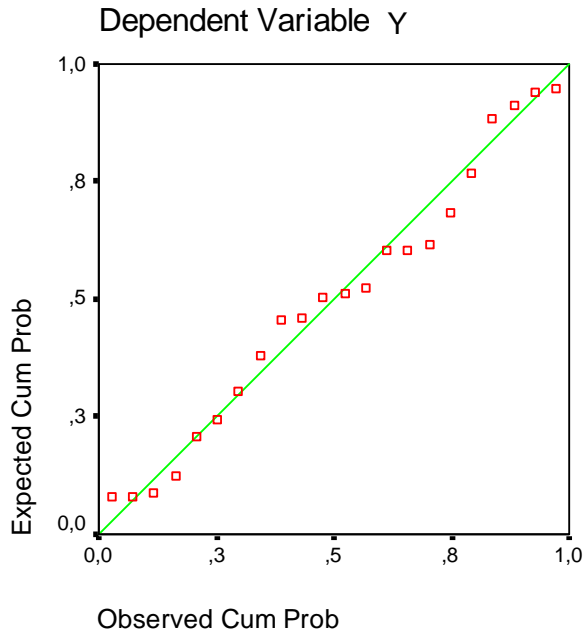
Histogram

Dependent Variable: Y

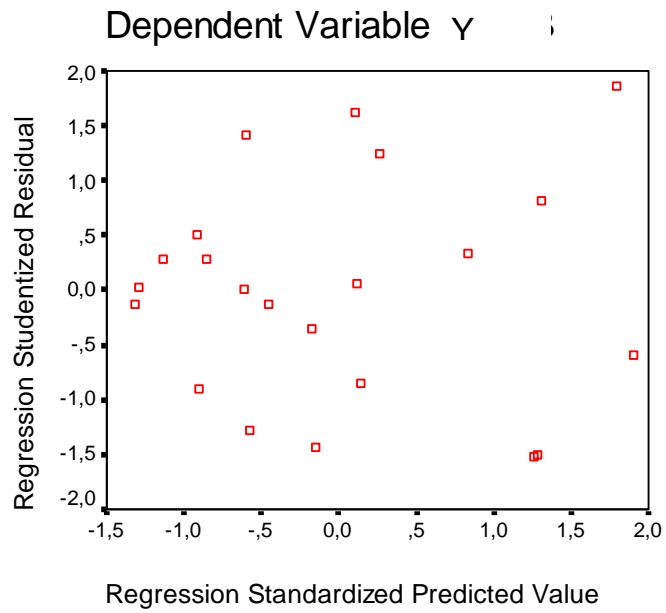


Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		22
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03986549
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.446
Asymp. Sig. (2-tailed)		.977

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.